

# LAPORAN DELEGASI DPR RI



dalam Rangka  
Menghadiri Konferensi  
***Asian Parliamentary Assembly (APA)  
Standing Committee  
For Social and Cultural Affairs***



19-24 September 2023



Baku-Azerbaijan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketua Parlemen Azerbaijan, HE. Mrs. Sahiba Gafarova, menyampaikan Surat Nomor 1-6/01-1/2-112/2023 tanggal 8 Juni 2023 kepada Sekretaris Jenderal *Asian Parliamentary Assembly (APA)* perihal Undangan kepada seluruh Anggota APA agar hadir dalam Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* yang akan diselenggarakan di Gedung Parlemen Azerbaijan di Baku pada tanggal 20 – 23 September 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) merupakan salah satu pendiri dari organisasi APA dan Anggota tetap APA serta telah berpartisipasi secara aktif sejak awal pembentukannya bernama *Association of Asian Parliamentarians for Peace (AAPC)* pada tahun 1999. Setelah AAPC bertransformasi menjadi APA pada tahun 2006, DPRRI menjabat Presiden APA pada tahun 2009 dan semakin aktif dalam persidangan APA.

DPR RI telah beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang APA yaitu :

1. *The 4<sup>th</sup> Plenary Session of the Asian Parliamentary Assembly (APA)* di Bandung pada tanggal 7-10 Desember 2009 dengan membahas tema '*The Roles of Asian Parliaments in Strengthening Democracy towards Prosperity, Peace and Justice in the Region*'.
2. *Meetings of 1<sup>st</sup> APA Executive Council* dan *APA Sub-Committee on Alleviating Poverty in Asia* diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12-13 October 2010
3. *APA Standing Committee* diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 - 20 Agustus 2015 yang membahas tiga tema utama yaitu : (i) *Linking Economic Growth to Sustainable Development Goals for Peace and Prosperity*; (ii) *The Sustainable Development Goals (SDGs): Time to Take Action*; dan (iii) *Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth*

Oleh karena itu, DPR RI mengirim Delegasi BKSAP untuk menghadiri Sidang APA di Baku sebagaimana Sidang-Sidang APA sebelumnya sebagai bukti konsistensi DPR RI melaksanakan diplomasi parlemen melalui kerangka multilateral APA.

## B. Dasar Pengiriman Delegasi

Pengiriman Delegasi DPR RI ke Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* di Baku berdasarkan :

1. Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Keputusan Pimpinan DPR RI pada rapatnya tanggal 24 Agustus 2023.
3. Keputusan Pimpinan BKSAP DPR RI pada tanggal 28 Juli 2023.
4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 56/PIMP/I/2023-2024 tanggal 4 September 2023 Tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rangka Menghadiri Sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Social and Cultural Affairs* Tanggal 20 – 23 September 2023 di Baku - Azerbaijan.
5. Surat Tugas Nomor 61/D/ST-PD.LN/BKSAP-KSR/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

## C. Susunan Delegasi

Susunan dan komposisi Delegasi DPR RI yang menghadiri Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* di Baku – Azerbaijan ini sebagai berikut :




**Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc**

FP-Gerindra/A-86  
Ketua BKSAP  
Ketua Delegasi

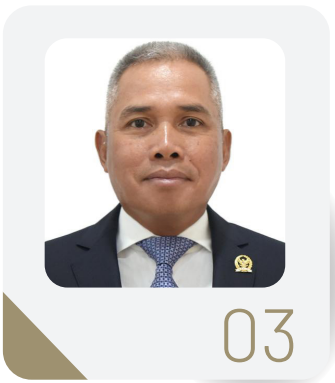
01

**Dr. H. Sukamta**

FP-PKS/A-445  
Wakil Ketua BKSAP  
Wakil Ketua Delegasi



02



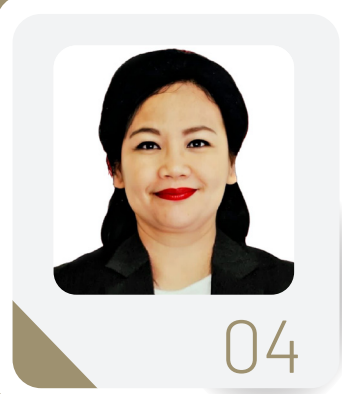
**Ir. H. Achmad Hafisz Tohir**

F-PAN/A-487  
Wakil Ketua BKSAP  
Wakil Ketua Delegasi

03

**Agustine Wilujeng Pramestuti**

F-PDIP/A-185  
Anggota BKSAP  
Anggota Delegasi



04




**Puteri Anetta Komarudin, B.Com**

F-PG/A-295  
Anggota BKSAP  
Anggota Delegasi

05

**Dr. Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LLM**

F-PD/A-546  
Anggota BKSAP  
Anggota Delegasi



06

## D. Maksud Dan Tujuan Pengiriman Delegasi

### 1. Maksud

Kehadiran Delegasi DPR RI ke Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* dimaksudkan untuk :

- a. Berpartisipasi aktif dalam persidangan APA karena DPR RI merupakan salah satu pendiri (*founding fathers*) APA dan Anggota Tetap APA
- b. Memainkan peran "*leading role*" di APA dari negara-negara Asia Tenggara
- c. Mendukung kepemimpinan Azerbaijan pada Sidang APA ini, khususnya pembentukan Komisi Perempuan APA, dan Presidensi APA tahun 2024 - 2026.

### 2. Tujuan

Adapun tujuan dari kehadiran Delegasi DPR RI ke Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* ini adalah untuk mempertahankan usulan-usulan Indonesia terhadap Draft-Draft Resolusi yang sedang dibahas dalam Sidang ini agar kepentingan nasional Indonesia dapat diterima oleh negara peserta lainnya.

## E. Misi Delegasi

Misi dari kehadiran Delegasi DPR RI ke Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* ini adalah untuk mendorong dilaksanakannya reformasi dalam organisasi APA melalui perubahan mekanisme persidangan yaitu tidak membahas kembali Resolusi-Resolusi yang telah lama diadopsi APA alih-alih melakukan implementasi dari Resolusi-Resolui tersebut.

## F. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Delegasi melakukan persiapan teknis dan persiapan substansi sebelum keberangkatan menuju Azerbaijan untuk menghadiri Sidang APA ini. Persiapan teknis antara lain registrasi, reservasi kamar hotel, komunikasi dengan KBRI di Baku maupun KBRI/KJRI di negara-negara transit, komunikasi dengan Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta terkait visa, pengurusan paspor dan *exit-permit* di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan pengurusan surat perjalanan dinas luar negeri. Pada persiapan substansi diperlukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait bahan materi. Tenaga Ahli menyiapkan butir wicara (*points of intervention*) Sidang dan pertemuan bilateral, usulan amandemen Draft Resolusi, *statement* untuk *General Debate*, *Press Release*, dan lainnya.

Bahan-bahan materi/substansi dimuat dalam bentuk *paperless* berupa link <https://drive.google.com/drive/folders/1W1Tr4Br4XddCwr8jaKTuqzWC-EHfW3Gb?usp=sharing> sehingga memudahkan delegasi untuk mengakses bahan/materi maupun mengupdate-nya.

## G. Anggaran

Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri untuk menghadiri Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dengan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 002.02.CF.5805.AEC.001.052.D.524211 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp. 1.408.836.050,- (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam ribu Lima Puluh Rupiah).

## II. ISI LAPORAN

### A. Agenda Konferensi

Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* ini akan bersidang sesuai Draft Agenda yang telah diajukan oleh APA Secretariat yaitu:

1. *Adoption of the Agenda*
2. *Election of Bureau*
3. *Opening Remarks by Chairperson*
4. *Report by APA Secretary General*
5. *Situation of Women Parliamentarians in Asia*
6. *General Debate on Draft Resolutions*
7. *Consideration of Draft Resolutions:*
  1. *Resolution on Measures to Promote Cultural Diversity and Protect Cultural Heritage in Asia*
  2. *Resolution on Asian Integration through Information and Communication Technology*
  3. *Resolution on Collaboration on Health Equity in Asia*
  4. *Resolution on Asian Parliamentarians Against Corruption*
  5. *Resolution on APA Women Parliamentarians*
  6. *Resolution on Promoting Dialogue and Harmony among Followers of World Religions*
  7. *Resolution on Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia*
  8. *Resolution on Effective Cooperation in Combating Illicit Drug Trafficking in Asia*
  9. *Draft Resolution on Humanitarian Aid to Syria, Iraq, Yemen, Gaza and Myanmar on the Verge of the Humanitarian Catastrophe (Deferred)*
  10. *Draft Resolution on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia (Deferred)*
  11. *Resolution on the Promotion of Quality Child and Youth Development for Sustainable Society in Asia*
  12. *Resolution on Ageing Society in Asia*
  13. *Resolution on Human Development in Asia*
  14. *Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia (New)*
  15. *Draft Resolution on Sustainable Tourism Cooperation in Asia (New)*
  16. *Draft Resolution on the Commission on Women (New)*
8. *Closing Session*
9. *Any other Matter*

## B. Uraian Tentang Situasi Umum Konferensi

Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* ini diselenggarakan di Gedung Parlemen Azerbaijan, Majlis Mclisi, dan dijadwalkan selama 4 (empat) hari yaitu :

Selasa, 19 September 2023 : Ketibaan Delegasi

Rabu, 20 September 2023 :

Kamis, 21 September 2023 : *Opening Session*

- *Meeting of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs*
  1. *Adoption of the Agenda*
  2. *Election of Bureau*
  3. *Opening Remarks by Chairperson*
  4. *Report by APA Secretary General*
  5. *Situation of Women Parliamentarians in Asia*
  6. *General Debate on Draft Resolutions*
- *Meeting of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs (continued)*
  1. *General Debate on Draft Resolutions*
  2. *Consideration of Draft Resolutions*
- *Official Dinner hosted by Prof. Dr. Sahiba Gafarova, Speaker of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan*  
*Venue: Mangal Restaurant*

Jum'at, 22 September 2023

- *Meeting of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs (continued)*
  1. *General Debate on Draft Resolutions*
  2. *Consideration of Draft Resolutions*
- *Meeting of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs (continued)*
  1. *Consideration of Draft Resolutions*
  2. *Closing Session*
  3. *Any other Matter*
- *City Tour (Heydar Aliyev Center dan Old Town)*

Sabtu, 23 September 2023 : Keberangkatan Delegasi

Minggu, 24 September 2023

Sidang ini dihadiri oleh sekitar 85 (delapan puluh lima) peserta yang terdiri dari para Anggota Parlemen dan Sekretariat dari 16 (enam belas) negara yaitu Azerbaijan, Bahrain, Kamboja, Iran, Indonesia, Irak, Kazakhstan, Kuwait, Pakistan, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkiye.





Delegasi APA dari 16 negara (Azerbaijan, Bahrain, Kamboja, Iran, Indonesia, Irak, Kazakhstan, Kuwait, Pakistan, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkiye) berfoto bersama di halaman depan Gedung Parlemen Azerbaijan di Baku setelah APA Opening Session pada 21 September 2023

Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* ini membahas 16 (enam belas) Draft Resolusi yang terdiri dari 11 Resolusi lama, 2 Draft Resolusi yang ditangguhkan (*deferred*) dan 3 Draft Resolusi baru yaitu :

1. *Draft Resolution on Measures to Promote Cultural Diversity and Protect Cultural Heritage in Asia*
2. *Draft Resolution on Asian Integration through Information and Communication Technology*
3. *Draft Resolution on Collaboration on Health Equity in Asia*
4. *Draft Resolution on Asian Parliamentarians Against Corruption*
5. *Draft Resolution on APA Women Parliamentarians*
6. *Draft Resolution on Promoting Dialogue and Harmony among Followers of World Religions*
7. *Draft Resolution on Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia*
8. *Draft Resolution on Effective Cooperation in Combating Illicit Drug Trafficking in Asia*
9. *Draft Resolution on Humanitarian Aid to Syria, Iraq, Yemen, Gaza and Myanmar on the Verge of the Humanitarian Catastrophe (Deferred)*
10. *Draft Resolution on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia (Deferred)*
11. *Draft Resolution on the Promotion of Quality Child and Youth Development for Sustainable Society in Asia*

12. *Draft Resolution on Ageing Society in Asia*
13. *Draft Resolution on Human Development in Asia*
14. *Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia (New)*
15. *Draft Resolution on Sustainable Tourism Cooperation in Asia (New)*
16. *Draft Resolution on the Commission on Women (New)*

*Draft Resolution on the Commission on Women* merupakan draft resolusi baru yang diajukan oleh Azerbaijan dan diperkenalkan oleh Chairperson of the *APA Standing Committee*, H.E Ms. Ganira ASHAYEVA

Sedangkan 2 Draft Resolusi baru yaitu *Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia* dan *Draft Resolution on Sustainable Tourism Cooperation in Asia* merupakan usulan Iran dan Turki.

### **1. Opening Session**

Pada Sesi Pembukaan, tiga tokoh terkemuka menyampaikan sambutannya (*Opening Remarks*) yaitu :

- H.E. M.R. MAJIDI, *APA Secretary General*
- H.E. Prof. Dr. Sahiba GAFAROVA, *Speaker of Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan*
- H.E. Mr. A.E. ONEN, *Representative of the APA term President and Head of delegation of Turkiye to the APA*



*Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Si (FP-Gerindra), Ketua BKSAP selaku Ketua Delegasi didampingi Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Sukamta (F-PKS) dan Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), dan Anggota BKSAP Agustine Wilujeng Pramestuti (F-PDIP) dan Puteri Anetta Komarudin, B.Com (F-PG) serta Dr. Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LLM (F-PD) sedang menghadiri Opening Session*



Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Si, Ketua BKSAP selaku Ketua Delegasi Indonesia bersama Wakil Ketua BKSAP, Dr. Sukanta menghadiri pembahasan Draft Resolusi

H.E. M.R. MAJIDI, *APA Secretary General*, menyampaikan bahwa Azerbaijan telah mencalonkan diri menjadi Presiden APA untuk periode mendatang (2024-2026). Dengan penyelenggaraan Sidang APA Standing Committee ini semoga Azerbaijan semakin mendapatkan dukungan.

H.E. Prof. Dr. Sahiba GAFAROVA, *Speaker of Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan* menyampaikan bahwa APA merupakan platform diplomasi parlemen yang penting untuk menyatukan upaya bersama dalam menghadapi isu-isu dan tantangan-tantangan saat ini guna mencapai penguatan Kerjasama, perdamaian dan stabilitas di Asia dan dunia.

*Draft Resolution "On the Commission on Women"* yang merupakan inisiatif dan usulan Delegasi Azerbaijani akan dibahas dalam Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* ini. Azerbaijan merupakan negara pertama di dunia Islam Timur (Moslem East) yang memberikan hak untuk memilih pada tahun 1918. Dalam rangka mengkonsolidasi solidaritas, kerjasama dan diplomasi parlemen di benua Asia, Azerbaijan telah mengajukan diri secara formal sebagai Presiden APA periode 2024-2025. Disampaikan pula permintaan dukungan terhadap daerah Garabah sebagai wilayah Azerbaijan yang berhasil dibebaskan dari pendudukan Armenia selama 30 tahun.

H.E. Mr. A.E. ONEN, *Representative of the APA term President and Head of delegation of Turkiye to the APA*, menyampaikan dukungannya terhadap Garabah sebagai bagian dari Azerbaijan dan merayakan pembebasannya bersama-sama. Azerbaijan dan Turkiye memiliki ikatan batin yang sangat unik dan khusus berdasarkan budaya, bahasa dan sejarah yang sangat mirip. Turkiye juga menyatakan dukungannya terhadap Presidensi APA periode 2024 – 2026 oleh Azerbaijan.



Bureau yang terdiri dari 3 orang (H.E. Ms. Garnia Pashayeva, Head of the delegation Azerbaijan, as Chairperson, H.E. Mr. N.A. Panhwar, Head of delegation of Pakistan, as Vice-Chair, H.E. Mr. A. Al-Saloom, Head of delegation of Bahrain, as Rapporteur) sedang memimpin sidang pada 21 September 2023



Posisi *Bureau* yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan *Rapporteur* ditetapkan dijabat oleh para Anggota Parlemen sebagai berikut :

- H.E. Ms. GARNIA PASHAYEVA, *Head of the delegation Azerbaijan, as Chairperson*
- H.E. Mr. N.A. PANHWAR, *Head of delegation of Pakistan, as Vice-Chair*
- H.E. Mr. A. Al-Saloom, *Head of delegation of Bahrain, as Rapporteur*

H.E. Ms. Garnia PASHAYEVA, *Chairperson of the meeting*, menyampaikan *Opening Remarks* bahwa untuk pertama kalinya Azerbaijan menjadi tuan rumah penyelenggara Sidang APA *Standing Committee on Social and Cultural Affairs* dan bertepatan dengan Ulang Tahun Ketiga Pembebasan Kota Susha yang merupakan Ibukota Budaya Azerbaijan dan Karabakh yang cantik dari pendudukan Armenia sehingga Sidang APA ini memiliki arti yang sangat penting. Setelah Merdeka tahun 1991, Azerbaijan memainkan peran perdagangan dan ekonomi serta spiritual dan budaya yang khusus antara Eropa dan Asia sebagai hasil kebijakan dari pemimpin nasional yang bijaksana Heydar Aliyev yang merayakan ulang tahun ke-100 tahun. Strategi pemimpin nasional telah dilanjutkan dengan sukses dan dikembangkan oleh President Ilham Aliyev. Saat ini, Azerbaijan merupakan negara transit atau *start-up* dengan proyek-proyek energi yang besar antara Asia dan Europe, dan berpartisipasi aktif di berbagai organisasi di Asia dan Eropa termasuk Gerakan Non-Blok. Tujuannya untuk memajukan dan mengimplementasikan hukum internasional, perdamaian, Pembangunan, kesejahteraan social, perlindungan warisan budaya, dan kesejahteraan.



*H.E. Ms. Garnia Pashayeva, Head of the delegation Azerbaijan, as Chairperson, menyampaikan sambutannya dalam Opening Session termasuk menjelaskan tentang kemenangan di pentingnya Provinsi Shusa bagi Azerbaijan*

Komisi APA ini akan membahas 16 Draft Resolusi yang sangat penting, dimana 3 Draft Resolusi baru yang diusulkan oleh Iran, Turki terkait Kerjasama turisme berkelanjutan dan diusulkan Azerbaijan terkait pembentukan Komisi Perempuan di APA.

Dr. MAJIDI, *APA Secretary General* kemudian melaporkan perkembangan terbaru dan isu-isu yang menonjol dalam Komisi Tetap ini, termasuk belum adanya Langkah-langkah tindak lanjut, yaitu :

## **A. Outstanding Issues**

### **1. Establishing an award to promote cultural diversity**

*APA Resolution on “Measures to Promote Cultural Diversity and Protect Cultural Heritage in Asia”* mendorong Parlemen Anggota APA agar membuat piala (*Award*) untuk diberikan setahun sekali kepada artis, pengarang, puisi, pembuat film, pelukis yang terkemuka di Asia dan telah menyampaikan dengan baik komitmen AIPA keanekaragaman budaya di Asia. APA mengharapkan ada Anggota APA yang secara sukarela menyerahkan piala ini setahun sekali guna mempromosikan keanekaragaman budaya di benua Asia.

### **2. Creating Asian Virtual Parliament**

*APA Resolution on “Asian Integration through Information and Communication Technology”* mendorong pembentukan *Asian Virtual Parliament* sebagai jalan untuk berbagi informasi, harmonisasi legislasi dan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang kegiatan badan legislasi dan menjamin adanya *feedback* yang mengena dari Masyarakat, kekuasaan dan individu yang mendukung penguatan keamanan di Asia. Parlemen Anggota APA juga diminta untuk secara sukarela menyediakan bantuan teknis, pengetahuan dan tahu-cara kerjanya, dukungan keuangan, sumber daya manusia untuk membentuk “*Virtual Asian Parliament*”.

### **3. Establishing Working Group to consider APA Plan of Action on Combating Corruption**

*Resolution on “Asian Parliamentarians against Corruption”* setuju untuk membentuk *working group* dibawah kekuasaan *Standing Committee on Social and Cultural Affairs* untuk membahas “*APA Plan of Action on Combating Corruption*”.

### **4. Formation of a separate Corps Unit**

Belum ada tindak lanjut terhadap *Resolution on “Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia”* menyetujui pembentukan suatu Badan Pengamanan (*Corps Unit*) dari Parlemen Anggota APA untuk melindungi dan menjaga harta kekayaan budaya historis dari bahaya penggalan yang membahayakan hukum, pencurian dan penyelundupan.

### **5. Creating a technical and professional training centre**

Belum ada tindak lanjut terhadap *APA Resolution on “Human Development in Asia”* menyetujui pembentukan pusat pelatihan profesional dan teknis dibawah naungan APA untuk memberikan Upaya-upaya bersama guna mendorong Pembangunan berkelanjutan kedepan.

## **6. Assign part of APA website to women parliamentarian**

*Resolution on “APA Women Parliamentarians”*, meminta Sekretariat APA menyediakan sebagian *website* untuk Anggota Parlemen Perempuan Asia. *APA website* yang dialokasikan untuk kegiatan ini telah tersedia dan mendorong para Anggota Parlemen Perempuan dapat menggunakan halaman *web* ini untuk kegiatan jaringan kerjanya.

## **B. Challenges and innovative ideas**

- Ada 16 *draft resolution* dari Komisi ini yang perlu dipertimbangkan ulang, diupdate, digabungkan, dimodifikasi atau digantikan dengan konteks yang lebih relevan dengan agenda tiga Komisi APA lainnya untuk menjaga tetap kondusif terhadap isu-isu global yang sedang berlangsung.
- Sebagaimana 3 Komisi Tetap lainnya ada beberapa *Draft Resolusi* yang tetap dibiarkan terjaga tanpa ada perubahan substansi dengan tidak adanya *Rules of Procedure* yang mengaturnya agar bisa masuk agenda
- Sama seperti organisasi internasional dan regional lainnya setelah masa pandemi COVID-19, APA harus berusaha keras untuk terlibat secara aktif dan aktif dalam segala hal yang relevan dengan urusan regional dan internasional. Parlemen Anggota APA diharapkan untuk secara aktif berkontribusi dan berbagi ide, rencana dan proyek inovatif mereka dalam kerangka Komite Tetap.
- Selama beberapa tahun terakhir sebagai Sekretaris Jenderal APA telah mencoba untuk memperkenalkan dan mengangkat ide dan rencana inovatif dalam laporan dan pernyataan di setiap pertemuan parlemen APA dengan tujuan untuk memantau, perkembangan social, budaya, wacana politik, ekonomi dan hukum di Kawasan regional dan internasional

### **1. Situation of Women Parliamentarians in Asia**

Pada Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* tahun 2014 telah disepakati untuk membentuk *Special Committee of APA women parliamentarians* (APA/Res/2014/16).

Beberapa Anggota Parlemen menyampaikan pandangannya tentang agenda item ini, yaitu : Bahrain, Cambodia, Iran, Iraq, Kazakhstan Pakistan and Syria. Pernyataan yang disampaikan meliputi isu-isu seperti : *Empowering women in Judiciary, Governments and Legislative branches, Statistics on women employments and entrepreneur, Gender equality, percentage of women representation in parliament etc.*

### **2. General Debate on Draft Resolutions:**

Para Peserta Sidang menyampaikan pandangannya terhadap isi Draft Resolusi yang diinginkan sebelum melakukan perubahan khusus. Topik-topik yang dibahas yaitu :

- Perlu diberikan perhatian lebih besar terhadap kerja sama budaya dengan skema generasi muda
- APA perlu mengambil ide-ide dari dialog antar kepercayaan dan budaya
- Perlu mengajukan *draft a Resolution* tentang pencegahan terhadap penghujatan kepada nilai-nilai suci (*sacred values*)
- Menghindari pengulangan Draft resolusi yang sama
- Mempertimbangkan adanya *emergency items* sebagai *draft resolutions*
- Menawarkan draft resolution yang baru ketimbang mengadopsi draft resolusi yang telah menjadi resolusi.

### C. Partisipasi Delegasi DPR RI

Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dalam setiap sesi persidangan dengan menyampaikan *statement* dan *points of intervention* serta masukan-masukan terhadap Draft Resolusi sebagai berikut :

#### a. *General Debate on Draft Resolutions*

Ketua Delegasi DPR RI, Dr. Fadli Zon, SS, M.Sc, pertama-tama menyampaikan *Introductory Remark* yang memuat pengenalan nama-nama Delegasi DPR RI. Kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada parlemen Azerbaijan atas penyelenggaraan Sidang yang sukses. Selanjutnya menyampaikan pandangan Indonesia terhadap isu-isu yang dibahas dalam Sidang sebagai berikut :

- Diplomasi budaya dapat digunakan untuk memajukan perbedaan kebudayaan nasional, keanekaragaman budaya global dan mengembangkan kerja sama dan komunikasi. Saat ini muncul bentuk baru dari diplomasi budaya yang dapat menguntungkan semua pihak dengan menggunakan budaya sebagai instrument perekat sosial dan komunikasi. Diplomasi budaya kontemporer dirasakan sebagai kerja sama jangka panjang dan berbagi hal-hal yang ideal ketimbang sebagai “memenangkan hati dan pikiran” untuk tujuan-tujuan strategis.
- Budaya juga dapat digunakan sebagai sumber pertumbuhan inklusif dan penciptaan pekerjaan, memajukan diskusi antar budaya dan saling kesepahaman baik didalam maupun antar masyarakat, untuk membuktikan pentingnya hak asasi manusia dan keanekaragaman budaya. APA dapat memainkan peran penting dalam menjaga (*preservation*) set-aset budaya di seluruh dunia dengan cara melakukan pelatihan, pengembangan keahlian, dan transfer pengetahuan antar negara Anggota
- Setelah *review* yang cermat terhadap draft resolutions, Delegasi Indonesia ingin mengklarifikasi dan menambahkan rekomendasi terhadap beberapa isu. Sebagian besar draft resolutions memiliki judul yang sama dan juga isi yang sama dengan resolusi-resolusi sebelumnya yang telah diadopsi oleh Sidang Pleno APA tahun 2019. Sebaiknya APA menetapkan prioritas draft resolusi yang akan dibahas agar tidak terjadi pengulangan dengan mendiskusikan hal-hal yang benar-benar sama setiap bersidang. Indonesia berpandangan bahwa Sidang APA sebaiknya tidak membahas draft resolusi apapun yang sama baik judul maupun isinya.



- Indonesia berpandangan sudah saatnya bagi APA untuk maju kedepan membahas implementasi resolusi APA yang telah diadopsi. Dengan implementasi resolusi maka APA dapat menjamin kebijakan yang memenuhi kebutuhan rakyat banyak dan adanya kepercayaan bahwa APA memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan ruang kepada negara-negara Asia untuk bekerja bersama secara kemitraan dan jaringan kerja untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat.



*Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Si (FP-Gerindra), Ketua BKSAP selaku Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan statement pada sesi General Debate didampingi Wakil Ketua BKSAP Dr. H. Sukamta (F-PKS) dan Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), dan Anggota BKSAP Agustine Wilujeng Pramestuti (F-PDIP) dan Puteri Anetta Komarudin, B.Com (F-PG)*

### ***b. Consideration of Draft Resolutions***

Pada saat pembahasan Draft Resolusi, Delegasi Indonesia memberikan masukan dan intervensi kepada setiap isu, yaitu :

- 1. Consideration of Draft Resolution on APA 13 th Plenary/SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/02 – Draft Resolution on Asian Integration through Information and Communication Technology*

*Underlining Acknowledging the fundamental role of information and communication technology as an indispensable factor in all areas of national; regional, and global development;*

~~Underlining the fundamental role of information and communication technology as an indispensable factor in all areas of national, regional, and global development;~~

~~6. Aware that cyberspace is susceptible to any acts of cyber warfare that could cause disruption due to data and information leakage;~~

2. *Consideration of Draft Resolution on APA 13 th Plenary/SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/05 – Draft Resolution on APA Women Parliamentarians*

*Considering women’s issues, including gender stereotypes, women’s empowerment, combating violence and discrimination ~~against them~~, which prevent them to enjoy access to health, services, education, equal opportunity, and fair pay; and seek to ~~and engaging~~ engage women in political, economic and social aspects of life;*

3. *Consideration of Draft Resolution on APA 13 th Plenary/SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/16 – Draft Resolution on the Commission on Women (New - Azerbaijan)*

Delegasi Indonesia focus kepada *Draft Resolution on the Commission on Women* usulan Azerbaijan. Pada dasarnya Indonesia mendukung Draft Resolusi ini dan dapat mendukungnya namun ada perbedaan pandangan terkait

- a) amendemen, penghapusan dan penggabungan pada *Paragraph Preambular 3,4,5,12, 13, 14, 15,17, 18*
- b) amendemen pada *preambular paragraph 7,8,11, 16*
- c) amendemen dan penggabungan *Preambular Paragraph 9 dan 10*

4. *Consideration of Draft Resolution on APA 13 th Plenary/SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/15 – Draft Resolution on Sustainable Tourism Cooperation in Asia (New -Iran)*

Delegasi DPR RI mengusulkan untuk memindahkan *Operative Paragraph (2)* menjadi *Preambular Paragraph (3)* dan amandemen kecil pada OP (6), dan mengamandemen *Operative Paragraph (4)* serta mengubah *Operative Paragraph (10)* yang asli menjadi *operative paragraph* yang baru.

5. *Consideration of Draft Resolution on APA 13 th Plenary/SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/14 – Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia (New - Turkiye)*

Delegasi DPR RI mengusulkan untuk memindahkan *Operative Paragraph (2)* menjadi *Preambular Paragraph (3)* dan amandemen kecil pada OP (6)

6. Indonesia ikut mendukung pandangan untuk menggabungkan *Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia (Turkiye)* dan *Draft Resolution on Sustainable Tourism Cooperation in Asia (Iran)* menjadi satu Draft Resolusi dengan judul baru



Delegasi Indonesia menghadiri Sidang yang membahas Draft Resolusi Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Sukamta (F-PKS) dan Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), dan Anggota BKSAP Agustine Wilujeng Pramestuti (F-PDIP) dan Dr. Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LL.M (F-PD)

#### D. Hasil-Hasil Konferensi

Sidang APA *Standing Committee on Social and Cultural Affairs* menghasilkan Draft Resolusi dan Laporan untuk diadopsi oleh Sidang Pleno ke-14 APA tahun 2024.

Dari 16 Draft Resolusi yang berhasil diadopsi ada 12 Draft Resolusi yaitu :

1. *Draft Resolution on Measures to Promote Cultural Diversity and Protect Cultural Heritage in Asia*
2. *Draft Resolution on Asian Integration through Information and Communication Technology*
3. *Draft Resolution on Collaboration on Health Equity in Asia*
4. *Draft Resolution on Asian Parliamentarians against Corruption*
5. *Draft Resolution of APA Women Parliamentarians*
6. *Draft Resolution on Promoting Dialogue and Harmony among Followers of World Religions*
7. *Draft Resolution on Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia*
8. *Draft Resolution on Effective Cooperation in Combating Illicit Drug Trafficking in Asia*
9. *Draft Resolution on the Promotion of Quality Child and Youth Development for Sustainable Society in Asia*

10. *Draft Resolution on Ageing Society in Asia*
11. *Draft Resolution on Human Development in Asia*
12. *Draft Resolution on the Commission on Women*

Sedangkan 4 Draft Resolusi lainnya ada yang ditangguhkan (*defer*) dan ada yang di-*merged* sebagai berikut:

1. *Draft Resolution on Humanitarian Aid to Syria, Iraq, Yemen, Gaza and Myanmar on the Verge of the Humanitarian Catastrophe* telah ditunda (*defer*) berkali-kali karena isinya sangat kontroversial. *Standing Committee* memutuskan di masa depan untuk tidak memberikan pertimbangan terhadap Draft Resolusi yang telah ditolak
2. *Draft Resolution on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia* telah ditunda (*defer*) dua kali dan isinya sangat kontroversial. *Standing Committee* memutuskan di masa depan untuk tidak memberikan pertimbangan terhadap Draft Resolusi yang telah ditolak
3. *Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia* akan digantikan dengan Draft Resolusi yang disponsori hasil gabungan (*merged*) dari Iran dan Turkiye. Dokumen hasil *merged* akan dibahas pada Sidang *Standing Committee* yang akan datang.
4. *Draft Resolution on Sustainable Tourism Cooperation in Asia* akan digantikan dengan Draft Resolusi gabungan hasil merger dari Iran dan Turkiye. Dokumen hasil *merged* akan dibahas pada Sidang *Standing Committee* yang akan datang.

## E. Lain-Lain

### 1. Pertemuan Bilateral dengan Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) Azerbaijan – Indonesia

Pada Rabu, 21 September 2023 pagi hari, sebelum *Opening Session*, Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI dan Ketua Delegasi DPR RI di APA, memimpin Delegasi DPR RI untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi Azerbaijan yang dipimpin oleh Hon. Ms. Garnia Pashayeva, Ketua Delegasi Azerbaijan di APA/Ketua Komisi Kebudayaan/Anggota GKSB Azerbaijan – Indonesia.

Pada pertemuan itu, Delegasi Azerbaijan meminta untuk mereview usulan Indonesia pada *Draft Resolution on the Commission on Women*. Delegasi Indonesia mendukung draft resolusi tentang pembentukan Komisi Perempuan usulan Azerbaijan, dan menyampaikan bahwa perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam semua aspek hidup adalah hal yang sangat krusial untuk dicapai oleh seluruh negara di Asia.



*Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Si, Ketua BKSAP selaku Ketua Delegasi didampingi Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Sukanta dan Ir. H. Achmad Hafisz Tohir, dan Anggota BKSAP Agustine Wilujeng Pramestuti (F-PDIP) dan Puteri Anetta Komarudin, B.Com (F-PG) serta Dr. Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LL.M (F-PD) menghadiri pertemuan bilateral dengan Delegasi Azerbaijan yang dipimpin oleh Hon. Ms. Garnia Pashayeva*





*Hon. Ms. Garnia Pashayeva, Ketua Delegasi Azerbaijan berfoto bersama Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Si, Ketua BKSAP selaku Ketua Delegasi didampingi Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Sukamta dan Ir. H. Achmad Hafisz Tohir, dan Anggota BKSAP Agustine Wilujeng Pramestuti (F-PDIP) dan Puteri Anetta Komarudin, B.Com (F-PG) serta Dr. Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LLM (F-PD)*



## 2. Kunjungan Kehormatan (*Courtesy Call*) dari Ketua BKSAP kepada Ketua Parlemen Azerbaijan, H.E. Ms. Sahiba Gafarova

Pada Rabu, 21 September 2023 siang hari, Ketua BKSAP DPR RI, melakukan pertemuan dengan Ketua Milli Majlis Azerbaijan H.E. Ms. Sahiba Gafarova. Pertemuan dilakukan bersamaan dengan kunjungan Delegasi DPR RI ke Azerbaijan untuk menghadiri Sidang Komisi Sosial dan Budaya *Asian Parliamentary Assembly (APA)* di Baku pada 20-23 September 2023.

Dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya peran APA dalam memperluas kerja sama antar parlemen se-Asia, dan juga disampaikan apresiasi yang tinggi terhadap hubungan bilateral yang sangat baik antara Azerbaijan dan Indonesia saat ini. Tercatat, Azerbaijan dan Indonesia tahun lalu merayakan 30 tahun terjalinnya hubungan diplomatik, dan telah bekerja sama erat di sejumlah organisasi parlemen internasional, antara lain IPU, NAM-PN (Non Blok), PUIC dan Azerbaijan sendiri adalah negara Observer dalam AIPA.

Pada saat yang sama, Sahiba Gafarova menyebutkan sangat bangga dengan penerimaan Milli Majlis Azerbaijan sebagai anggota pengamat Perhimpunan Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) dan menekankan pentingnya organisasi kawasan tersebut. Delegasi Indonesia turut hadir dalam Konferensi NAM-PN di Baku pada tahun 2022 untuk pembentukan organisasi Jaringan Parlemen Gerakan Non-Blok. Pada tahun itu Ketua Milli Majlis, Sahiba Gafarova, juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta untuk membahas prospek pengembangan hubungan antar parlemen kedua negara.

Fadli Zon, selaku Ketua Delegasi DPR RI pada Sidang APA, menyampaikan ucapan terima kasih atas keramah-tamahan yang diberikan kepada delegasi dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya Sidang APA dengan lancar dan sukses. Fadli Zon mencatat bahwa Indonesia sangat memperhatikan dan mengutamakan pengembangan hubungan dengan Azerbaijan lebih lanjut di banyak bidang.

Fadli Zon juga mendukung pencalonan Azerbaijan dalam keketuaan APA periode 2024-2026. Ia berharap akan ada terobosan-terobosan baru dalam organisasi ini terutama dalam penerapan resolusi yang telah diadopsi dan juga monitoring dan evaluasi atas implementasi resolusi tersebut.

## 3. Kunjungan ke Pusat Kebudayaan Heydar Aliyev

Setelah Sidang selesai, Parlemen Azerbaijan mengadakan kegiatan khusus kunjungan ke Pusat Kebudayaan Heydar Heydar Aliyev yang terletak dekat dengan pusat kota Baku.

Dibuka pada tahun 2012, Pusat Kebudayaan Heydar Heydar Aliyev merupakan bangunan besar dilengkapi dengan aula konferensi (auditorium), aula galeri, museum dan taman. Bangunan ini terkenal karena arsitekturnya yang khas dan gaya lengkung yang mengalir.

Bangunan ini dimaksudkan untuk memainkan peran integral dalam kehidupan intelektual kota dan memainkan peran penting dalam pembangunan kembali kota Baku.

Nama bangunan ini diambil dari Heydar Aliyev, sekretaris pertama Soviet yang menjabat dari 1969 hingga 1982, dan Presiden Republik Azerbaijan dari Oktober 1993 hingga Oktober 2003.

Proyek ini mulai dibangun pada 2007 oleh arsitek berkebangsaan Irak-Inggris, Zaha Hadid, yang terpilih sebagai arsitek yang merancang bangunan ini melalui kompetisi.



Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc (FP-Gerindra), Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Sukamta (F-PKS), dan Anggota BKSAP, Puteri Komarudin (F-PG) mengikuti kegiatan kunjungan ke Pusat Kebudayaan Heydar Aliyev di Baku



*Hon. Ms. Garnia Pashayeva, Ketua Delegasi Azerbaijan berfoto bersama para Ketua Delegasi dari berbagai negara termasuk Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Si, Ketua BKSAP selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam acara Dinner by APA Chairperson*



#### 4. Acara Jamuan Makan oleh Parlemen Azerbaijan

Di sela-sela persidangan, Parlemen Azerbaijan menjamu delegasi dalam acara jamuan makan siang ataupun jamuan makan malam sebagai acara ramah tamah dan keakraban tuan rumah kepada semua delegasi. Selama acara banyak dihidangkan masakan tradisional Azerbaijan. Kegiatan ini sangat sesuai dengan topik-topik yang dibahas dalam sidang terkait diplomasi budaya, dimana budaya dapat digunakan sebagai instrumen perekat sosial dan komunikasi.

#### 5. Pertemuan dengan Duta Besar KBRI Baku dan Jajaran

Di sela-sela persidangan, Duta Besar LB&BP untuk Azerbaijan HE Bapak Hildi Hamid mengagendakan pertemuan dengan Delegasi DPR RI. Pertemuan membahas perkembangan terkini hubungan bilateral Indonesia – Azerbaijan dan persoalan yang dihadapi untuk dicarikan solusi agar hubungan bilateral semakin menguat.



*H.E. Mr. Hildi Hamid, Duta Besar LB & BP untuk Azerbaijan di Baku beserta jajaran menjamu Delegasi DPR RI ke Sidang APA dalam rangka working lunch untuk pembekalan Deleasi atas atas isu-isu yang akan dibahas dalam Sidang.*

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* telah terlaksana pada tanggal 21-22 September 2023 di Baku – Azerbaijan dengan lancar, aman dan sukses.
2. Sidang menyetujui untuk menunjuk H.E. Ms. G. PASHAYEVA, *Head of the delegation Azerbaijan*, sebagai *Chairperson*, dan H.E. Mr. N.A. PANHWAR, *Head of delegation of Pakistan*, sebagai *Vice-Chair*
3. Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* di Baku dihadiri oleh sekitar 85 (delapan puluh lima) peserta yang terdiri dari para Anggota Parlemen dan Sekretariat dari 16 (enam belas) negara
4. Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* di Baku telah membahas 16 (enam belas) Draft Resolusi yang terdiri dari 11 Resolusi lama, 2 Draft Resolusi yang ditangguhkan (*deferred*) dan 3 Draft Resolusi baru
5. Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* di Baku telah menyepakati untuk :
  - a. menyetujui dengan suara bulat (*unanimously*) Agenda Sidang
  - b. mengadopsi 12 (dua belas) buah Draft Resolusi, termasuk *Draft Resolution on the Commission on Women* usulan Azerbaijan
  - b. Dua Draft Resolusi yang ditangguhkan yaitu *Draft Resolution on Humanitarian Aid to Syria, Iraq, Yemen, Gaza and Myanmar on the Verge of the Humanitarian Catastrophe* dan *Draft Resolution on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia* tidak akan dibahas lagi pada pertemuan mendatang dengan pertimbangan isinya kontroversial dan telah ditangguhkan beberapa kali.
  - c. Komisi APA ini memutuskan bahwa Draft Resolusi yang telah ditangguhkan dua kali maka tidak akan dibahas lagi di masa depan
  - d. Dua Draft Resolusi yang sama yaitu *Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia* usulan Iran dan *Draft Resolution on Sustainable Tourism Cooperation in Asia* usulan Turkiye akan digabungkan dan akan dibahas lagi pada Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* yang akan datang
6. Delegasi DPR RI mengajukan usulan amandemen untuk 3 (tiga) Draft Resolusi yaitu : *Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia* ; *Draft Resolution on Sustainable Tourism Cooperation in Asia* ; dan *Draft Resolution on the Commission on Women*
7. Usulan amandemen dari Delegasi DPR RI untuk *Draft Resolution on the Commission on Women* menjadi perdebatan keras dengan Azerbaijan dan pada akhir Sidang Delegasi Thailand menegaskan posisinya agar Draft Resolusi tersebut tetap pada versi aslinya (*original version*).

8. Pada sesi *General Debate on Draft Resolutions*, para peserta menyampaikan pandangan dan gagasannya terhadap isi Draft Resolusi yang diminatinya sebelum menjelaskan usulan amandemennya secara rinci.
9. Pada sesi *General Debate on Draft Resolutions*, Delegasi DPR RI menyampaikan pandangannya tentang :
  - APA harus memanfaatkan gagasan *inter-faith dialogue and cultures*
  - APA perlu memberikan perhatian pada konteks kerja sama kebudayaan dalam kerangka
  - Perlu membuar *Draft Resolution on prevention of blasphemy against sacred values*
  - Menghindari pengulangan (*redundancy*) berkali-kali dalam mengadopsi Draft resolution yang sama
  - Mempertimbam *emergency items* sebagai draft resolutions
  - Menyusun Draft Resolution yang baru dibandingkan membahas Draft Resolusi yang telah ada.
10. Hasil Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* di Baku ini akan dilaporkan kepada Sidang Pleno APA yang akan diselenggarakan oleh Azerbaijan tahun 2024





## B. Saran

1. Delegasi DPR RI perlu hadir secara rutin pada Sidang *APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs*
2. Perlu diadakan rapat persiapan Delegasi DPR RI dengan mengundang Kementerian Luar Negeri dan Kementerian lainnya yang terkait
3. DPR RI perlu mendukung Azerbaijan menjadi Presiden APA periode 2024 – 2026
4. DPR RI perlu mengusulkan kegiatan *Outstanding Issues dari APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs* yang belum terlaksana sebagai bukti komitmen dan dukungan Indonesia terhadap APA

## IV. PENUTUP

### A. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih pertama-tama disampaikan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen) di :

1. KBRI untuk Azerbaijan di Baku atas bantuannya pendampingan Delegasi sejak masa persiapan, masa pelaksanaan hingga paska pelaksanaan Sidang
2. KBRI untuk Qatar di Doha atas bantuannya pendampingan Delegasi selama Delegasi DPR RI melakukan transit di Doha dalam perjalanan menuju ke dan dari Baku
3. KBRI untuk Uni Emirat Arab di Abu Dhabi dan KJRI di Dubai atas bantuannya pendampingan Delegasi selama Delegasi DPR RI melakukan transit di Dubai dalam perjalanan menuju ke dan dari Baku
4. KBRI untuk Turki di Ankara dan KJRI Istanbul atas bantuannya pendampingan Delegasi selama Delegasi DPR RI melakukan transit di Istanbul dalam perjalanan menuju ke dan dari Baku

### B. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi dengan lampiran berupa :

- *Report of the APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs*
- *List of Adopted Resolutions*
- *List of Draft Resolutions*
- *Agenda*
- *Annotated Agenda*
- *Program of Works*
- *List of Participants*
- *Statement of the Indonesian Head of Delegation*
- *Points of Intervention*
- *Press Release*
- Dokumen sosial media (Instagram, youtube)
- Galeri foto

[https://drive.google.com/drive/folders/1Stf\\_Zi0LC5Xeunpvrb12sbAXY\\_I8H7q5?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Stf_Zi0LC5Xeunpvrb12sbAXY_I8H7q5?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/drive/folders/1QjCeZEpnGZLOjE7NHx\\_20cb7eiiVRp-R](https://drive.google.com/drive/folders/1QjCeZEpnGZLOjE7NHx_20cb7eiiVRp-R)

### C. Kata Penutup

Demikian Laporan Delegasi ini disusun dalam rangka prinsip keterbukaan dan bukti pertanggungjawaban kegiatan Delegasi. Laporan ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk sidang-sidang parlemen selanjutnya.

Jakarta, 29 September 2023

a.n. Delegasi DPR RI  
Ketua Delegasi / Ketua BKSAP



Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc  
A-86

## V. LAMPIRAN



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Rep/2023/11  
23 September 2023  
Azerbaijan

### Standing Committee on Social and Cultural Affairs

Baku-Republic of Azerbaijan  
20-23 September 2023

## Final Report

The Meeting of Standing Committee on Social and Cultural Affairs was held on 21- 22 September 2023 in Baku, Republic of Azerbaijan and parliamentary delegations from following member countries participated in the Meeting:

Azerbaijan, Bahrain, Cambodia, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kuwait, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkiye ([Attachment I](#))

#### Opening Session:

At the opening session, the following dignitaries presented their remarks:

- H.E. M.R. MAJIDI, APA Secretary General
- H.E. Prof. Dr. Sahiba GAFAROVA, Speaker of Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan
- H.E. A.E. ONEN, Representative of the APA term President and Head of delegation of Turkiye to the APA

([Attachment II](#))

#### 1. Adoption of the Agenda

The Member Parliaments unanimously adopted the Draft Agenda. ([Attachment III](#))

#### 2. Election of Bureau

The committee approved the following parliamentarians as members of its Bureau:

- H.E. Ms. G. PASHAYEVA, Head of the delegation Azerbaijan, as Chairperson
- H.E. Senator NISAR AHMED KHUHRO, Head of delegation of Pakistan, as Vice-Chair
- H.E. Mr. A. Al-Saloom, Head of delegation of Bahrain, as Rapporteur

#### 3. Opening remarks by the Chairperson

H.E. PASHAYEVA, Chairperson of the meeting, presented her opening remarks and welcomed all participants. ([Attachment IV](#))

#### 4. Report by APA Secretary General

Dr. MAJIDI, APA Secretary General reported on the latest development and outstanding issues of the Standing Committee.

([Attachment V](#))

#### 5. Situation of Women Parliamentarians in Asia:

APA by /Res/2014/16, decided to establish Special Committee of APA women parliamentarians under the Standing Committee on Social and Cultural Affairs.

The following member parliaments presented their views on this agenda item: Bahrain, Cambodia, Iran, Iraq, Kazakhstan Pakistan and Syria. The statements covered issues such as: Empowering women in Judiciary, Governments and Legislative branches, Statistics on women employments and entrepreneur, Gender equality, percentage of women representation in parliament etc.

#### 6. General Debate on Draft Resolutions:

Participants were called upon to express their general views on the content of interested draft resolutions before addressing the specific amendments. The following topics of importance were raised:

- More attention should be given to Cultural cooperation in the frame work of smart young generation
- APA should benefit from idea of inter-faith dialogue and cultures
- Need to draft a Resolution on prevention of blasphemy against sacred values
- Avoiding redundancy in adopting same draft resolutions
- Considering emergency items as draft resolutions
- Offering new draft resolutions instead of considering already adopted ones

#### 7. Consideration of Draft Resolutions:

At the beginning of the consideration of this item, Deputy Secretary General presented the rule of conduct for addressing draft resolutions and related amendments. He stressed on the following:

- There are 16 draft resolutions
- On each draft resolution we only address the amended Paragraphs
- The priority is given to the written amendments submitted before
- The Chair will call on authors of amendments to introduce them first
- The Chair will rule on the final outcome of debates
- Be brief when presenting your views (i.e. in dictation speed)
- The titles of draft resolutions are to stay intact

After extensive debates, exchange of views on amendments, the following draft resolutions were updated and adopted by consensus:



1. Draft Resolution on Measures to Promote Cultural Diversity and Protect Cultural Heritage in Asia: **(Adopted)**
2. Draft Resolution on Asian Integration through Information and Communication Technology: **(Adopted)**
3. Draft Resolution on Collaboration on Health Equity in Asia: **(Adopted)**
4. Draft Resolution on Asian Parliamentarians against Corruption: **(Adopted)**
5. Draft Resolution of APA Women Parliamentarians: **(Adopted)**
6. Draft Resolution on Promoting Dialogue and Harmony among Followers of World Religions: **(Adopted)**
7. Draft Resolution on Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia: **(Adopted)**
8. Draft Resolution on Effective Cooperation in Combating Illicit Drug Trafficking in Asia: **(Adopted)**
9. Draft Resolution on Humanitarian Aid to Syria, Iraq, Yemen, Gaza and Myanmar on the Verge of the Humanitarian Catastrophe: **(Due to the controversial contents, this draft resolution has been deferred several times. The Standing Committee decided to avoid consideration of any draft resolutions which is deferred twice, in its future meetings)**
10. Draft Resolution on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia: **(Due to the controversial contents, this draft resolution has been deferred several times. The Standing Committee decided to avoid consideration of any draft resolutions which is deferred twice, in its future meetings)**
11. Draft Resolution on the Promotion of Quality Child and Youth Development for Sustainable Society in Asia: **(Adopted)**
12. Draft Resolution on Ageing Society in Asia: **(Adopted)**
13. Draft Resolution on Human Development in Asia: **(Adopted)**
14. Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia: **(This draft resolution was replaced by a merged draft resolution sponsored by Iran and Turkiye. The merged document will be considered during the next Standing committee meeting.)**
15. Draft Resolution on Sustainable Tourism Cooperation in Asia: **(This draft resolution was replaced by a merged draft resolution sponsored by Iran and Turkiye. The merged document will be considered during the next Standing committee meeting.)**
16. Draft Resolution on the Commission on Women; **(Adopted).**

This draft resolution was introduced by the Chairperson, H.E Ms. PASHAYEVA ([Attachment VI](#))

Delegation of Thailand stated that they confirmed the original version of this draft resolution.

**8. Closing Session:** Following the consideration of all Agenda items, the meeting of Standing Committee was adjourned.

\*\*\*

Attachment I



## Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Social and Cultural issues

### List of Participants

20-23 September, 2023  
Baku, Azerbaijan

#### Azerbaijan

1. Ms. Sahiba Gafarova Speaker of the Milli Majlis
2. Ms. Ganira Pashayeva Head of the Delegation to the APA of the Milli Majlis
3. Mr. Ilham Mammadov Member of the Delegation to the APA
4. Mr. Aydın Huseynov Member of the Delegation to the APA
5. Mr. Anar Mammadov Member of the Delegation to the APA
6. Mr. Farid Haggiyev Chief of Staff
7. Mr. Teymur Taghiyev Head of the Secretariat
8. Mr. Ilkin Mammadov Head of the International relations department
9. Mr. Elmar Huseynov Assistant to the Speaker
10. Ms. Nafila Rahimova Secretary of the Delegation

#### Bahrain

11. Mr. Ahmed Alsloom Head of the Delegation
12. Mr. Abdulaziz Abul Member of Parliament
13. Ms. Ebtesam Aldallal Member of Parliament
14. Mr. Abdulla AlRomaini Member of Parliament
15. Mr. Ali Alaradi Staff
16. Mr. Mohamed Bin Daina Staff

#### Cambodia

17. Mr. Sokun Ty Head of the Delegation
18. Ms. Chanmatin Phav Staff

#### Iran

19. Mr. Mohammad Mehdi Zahedi Head of the Delegation
20. Mr. Masumeh Pashaei Bahram Member of Parliament
21. Mr. Ali Ali Zadeh Member of Parliament
22. Mr. Reza Hassani Staff

23. Mr. Leila Taati Staff  
24. Mr. Mohammad Javad Emamian Staff of embassy
- Indonesia**
25. Mr. Fadli Zon Head of the Delegation  
26. Mr. Sukamta Sukamta Member of Parliament  
27. Mr. Achmad Hafisz Member of Parliament  
28. Ms. Agustina Wilujeng Pramestuti Member of Parliament  
29. Ms. Puteri Anetta Komarudin Member of Parliament  
30. Mr. Didi Irawadi Syamsuddin Member of Parliament  
31. Ms. Warsiti Alfiah Staff  
32. Mr. Ahmadi Staff  
33. Ms. Rindias Mega Rahmawati Staff  
34. Ms. Made Fitri Maya Padmi Staff  
35. Ms. Merita Yenni Counsellor of Ambassador  
36. Ms. Wanda Widya Staff of embassy  
37. Ms. Parvana Karimova Staff of embassy  
38. Mr. Rashad Mardanov Staff of embassy
- Iraq**
39. Mr. Jabbar Al Chnani Head of the Delegation  
40. Mr. Haider Al Selami Member of Parliament  
41. Mr. Maki Rissan Abdulla Al-Mamori Ambassador  
42. Mr. Maadh Al Sudani Staff
- Kazakhstan**
43. Mr. Yerlan Sairov Head of the Delegation
- Kuwait**
44. Mr. Mohammad Alajmi Head of the Delegation  
45. Mr. Hamad Alobaid Member of Parliament  
46. Mr. Abdulaziz Nasrallah Staff  
47. Mr. Suad Alraqam Staff  
48. Mr. Saad Alajmi Secretary of the Delegation  
49. Mr. Elnur Abbasov Photographer
- Pakistan**
50. Senator Nisar Ahmed Khuhro Head of the Delegation  
51. Mr. Muhammad Salman Staff  
52. Mr. Nisar Ahmed Panhwar Staff  
53. Mr. Muhammad Imran Qureshi Staff

### **Palestine**

54. Mr. Nasser Abdal Wahab Ambassador  
55. Ms. Miar Rantisi Deputy Ambassador

### **Qatar**

56. Mr. Ahmad bin Hitmi Al-Hitmi Head of the Delegation  
57. Mr. Nasser bin Metrif Al-Hemeidi Member of Parliament  
58. Mr. Faisal Abdullah Al-Henzab Ambassador  
59. Mr. Mohammed bin Hamad Al-Hassan Staff

### **Saudi Arabia**

60. Mr. Hani Khashoggi Head of the Delegation  
61. Mr. Saad Alangari Staff

### **Syria**

62. Mr. Mefleh Al Nasrallah Head of the Delegation  
63. Mr. Mustafa Al Mustafa Member of Parliament  
64. Mr. Rami Saleh Member of Parliament  
65. Mr. Majd Saoud Staff

### **Tajikistan**

66. Mr. Fozil Obidzoda Head of the Delegation  
67. Mr. Dzhaloliddin Burkhanov Staff

### **Thailand**

68. Mr. Virasakdi Futrakul Head of the Delegation  
69. Mr. Worawit Baru Member of Parliament  
70. Mr. Russdy Khantanit Secretary of the Delegation  
71. Mr. Apirat Sugondhabhirom Ambassador  
72. Mr. Pipat Charoensuk Staff

### **Turkiye**

73. Mr. Abdulkadir Emin Onen Head of the Delegation  
74. Mr. Omer Ozmen Member of Parliament  
75. Mr. Vecdi Gundoghdu Member of Parliament  
76. Mr. Osman Cenghiz Candar Member of Parliament  
77. Mr. Ilyas Topsakal Member of Parliament  
78. Mr. Cahit Bagchi Ambassador  
79. Mr. Murat Hasturk Staff  
80. Ms. Elif Esra Onal Staff  
81. Mr. Levent Kizilbaghli Staff



### **APA Secretariat**

82. Mr. Mohammad Reza Majidi
83. Mr. Kia Tabatabaee
84. Mr. Mehdi Ghashghavi
85. Mr. Mehdi Mollahosseini

- Secretary General
- Deputy Secretary General
- Executive Deputy of Secretariat
- APA Senior Expert

Attachment II



**Asian Parliamentary Assembly  
Standing Committee on Social and Cultural Affairs  
Baku- Republic of Azerbaijan  
20-23 September 2023**

**Opening Remarks by APA Secretary General**

**Excellencies,  
Distinguished Delegates,  
Ladies and Gentlemen,**

It is my pleasure and honor to address you at the meeting of the APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs in the historical and magnificent city of Baku, the capital of the Republic of Azerbaijan .

On behalf of all the delegation present here, staff of the APA Secretariat and on behalf of myself, I would like to express my sincere and heartfelt gratitude to Prof. Dr. Sahiba GAFAROVA, Hon. Speaker of Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan and other high ranking officials of the Government and Parliament for the organization of this meeting and their generous hospitality.

It is also an honor and privilege for the APA to have the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan as one of its most dedicated and active member of its community to Chair and host the meeting of the APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs this year as the APA Vice-President.

**Excellencies,  
Distinguished Delegates,  
Ladies and Gentlemen,**

We have come a long way at various APA Meetings and achieved some of our goals based on all the efforts made by pervious Standing Committee chairs. We are confident that the Milli Majlis of Azerbaijan through its wisdom, commitment and professionalisms, poised to steer the Standing Committee leadership in such manner which will enable us to fulfill our duties and better serve the APA. We are obliged to extend our full support in any way possible to make this period a success as we did in previous occasions.

I would also like to seize this opportunity to welcome the candidacy of the Republic of Azerbaijan for the next term of APA Presidency (2024-2026). I am confident that successful outcome of the



Standing Committee on Social and Cultural Affairs under the professional leadership of Azerbaijan as Chair of the Meeting, will serve as a milestone in support of this candidacy.

In this context, I wish to stress that APA Secretariat shall deem itself committed to do its best for the promotion and realization of the objectives of our organization through full utilization of its human resources as well as its capabilities and potentials and will spare no effort to make the Milli Majlis of Azerbaijan Chairmanship a success.

I wish you all fruitful and constructive deliberations during the meeting of standing Committee on Social and Cultural Affairs in Baku.

Thank you very much for your attention.



**Asian Parliamentary Assembly  
Meeting of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs  
21 September 2023**

**Speech of H.E. Prof. Dr. Sahiba GAFAROVA, Speaker of Milli Majlis of the Republic of  
Azerbaijan**

**Distinguished Secretary General,  
Dear Committee members,  
Dear guests,**

I am delighted to welcome you all to the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan!  
The Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan considers it crucial to strengthen and advance its cooperation with the Asian Parliamentary Assembly, the sole organization that unites Asian nations under a common umbrella at the Inter-Parliamentary level.

The Asian Parliamentary Assembly is a significant platform of parliamentary diplomacy that unites common efforts to address current issues and challenges in order to achieve strengthening of cooperation, peace, and stability in Asia and the world.

The activity of the organization aimed at promoting solidarity and fostering cooperation across various fields within the Asian continent deserves special attention.

Today, during the meeting of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs draft resolutions on many current issues in the Asian region will be discussed. The subjects such as promotion of cultural diversity and protection of cultural heritage, Asian integration through information and communication technologies, advancement of interfaith dialogue among world religions, collaboration among the fields of law and legislation in the fight against smuggling of cultural resources and others, are of great importance for the region as a whole.

It is a momentous fact that the Draft Resolution “On the Commission on Women”, initiated and authored by the Azerbaijani delegation, will be discussed here as well.

Despite the execution of certain measures and countless efforts towards women empowerment, serious problems still persist in this field. The aforementioned draft resolution proposes the establishment of a Commission on Women within the framework of the Asian Parliamentary Assembly for the purpose of solving related problems.

It is no coincidence that the initiative to establish the Commission on Women was put forward by the political and ideological successor of the Azerbaijan Democratic Republic, which was first in the Muslim East to give women the right to vote in 1918.

The presented document thoroughly outlines the reasons, goals, functions, and framework for the establishment of the Commission.



We believe that the establishment of the “Commission on Women” will guarantee that the protection of women’s rights and the issue of ensuring gender equality are maintained in the foreground in the activities of the APA and will make a positive contribution to the elimination of discrimination against women in Asian countries.

**Dear participants!**

The advancement of cooperation with Asian nations is regarded as a key focus for Azerbaijan, situated in a strategic crossroads where East meets West. Besides being the cradle of many ancient civilizations, Asia is presently acknowledged as one of the foremost hubs of global development.

Our parliament, in turn, places significant emphasis on enhancing bilateral and multilateral ties with the parliaments of Asian nations through the avenue of parliamentary diplomacy, exerting considerable effort in this direction. In this context, cooperation with the Asian Parliamentary Assembly is very important for Azerbaijan.

In pursuit of consolidating solidarity, cooperation, and parliamentary diplomacy across the Asian continent, Azerbaijan has formally submitted its candidacy for the Chairmanship of the Asian Parliamentary Assembly for the term 2024-2025.

In case Azerbaijan is elected as the chair of the organization, special importance will be placed on matters including enhancing the institutional structure of the Asian Parliamentary Assembly and furthering collaboration with other inter-parliamentary entities.

In this regard, we hope that you will lend your support to Azerbaijan.

**Dear participants,**

Taking this opportunity, I would like to inform you on the situation currently taking place in the South Caucasus that affects peace and stability in the wider region.

After liberating its territories from 30-year long Armenian occupation in 2020, Azerbaijan has initiated normalization of relations and signing of a peace treaty with Armenia on the basis of norms and principles of international law.

You would agree that respect to sovereignty and territorial integrity are the foundations that underpin today’s international order.

Despite Azerbaijan’s strong will and consistent steps taken for the long-lasting peace and stability, Armenia has been doing right the opposite. Backtracking from agreements and introducing new pretexts, escaping from real negotiations, perpetrating military and political provocations, sustaining illegal separatist regime created in our territories through all possible means have been certain line of conduct by Armenia for the last two and half years.

Azerbaijan has repeatedly called for unconditional and complete withdrawal of Armenia’s more than 10 thousand-strong armed forces from the Garabagh region of Azerbaijan and the dissolution of the puppet regime. This is a vital precondition for achieving peace and stability in the region.

On September 19, Armenian armed forces stationed in the Garabagh region of Azerbaijan resorted to a number of large-scale military provocations and terror attacks.

In response to these provocations, Azerbaijan has launched local counter-terrorism measures in the region. The aim of these measures were the disarmament and withdrawal of units of the armed forces of Armenia from the territories of Azerbaijan, neutralization of their military infrastructure, ensuring the safety of peaceful population and restoring the constitutional system of the Republic of Azerbaijan.

Considering the appeal by the representatives of the Armenian residents living in the Garabagh region of Azerbaijan, yesterday an agreement has been reached to stop the antiterror measures under aforementioned terms.

We do hope that dialogue with representatives of the Armenian residents that will restart today, will result in their reintegration into Azerbaijani society. And we also do hope that Armenia will act responsibly within the framework of the normalization process and will sign the peace agreement that will ensure long-term peace and stability in our region.

**Dear participants,**

In conclusion, I would like to extend my greetings to each of you once again and wish the Committee success in its endeavors. I am confident that this meeting will be fruitful and play a significant role in addressing the present challenges faced by the Asian region.

Thank you for your attention!

**SPEECH OF MR. EMİN ÖNEN**  
**(21 September 2023, Baku)**

Distinguished Chair,  
Mr. Secretary General,  
Dear Colleagues, Ladies and  
Gentlemen,

I am delighted to join you at the Standing Committee on Social and Cultural Affairs of the Asian Parliamentary Assembly (APA).

At the outset, I would like to express my pleasure to be in brotherly country of Azerbaijan.

Türkiye and Azerbaijan enjoy a unique and special bond based on our shared history, language and culture.

The expression “One nation, two states” by Haydar Aliyev and “Azerbaijan’s joy is our joy, grief is our grief” by Mustafa Kemal Atatürk define the unprecedented nature of these relations.

We have already clearly seen that these are not only words but the expression of reality on several occasions.

As two brotherly countries, we stand by each other.

We cried and mourned when Karabakh was occupied. After almost 30 years, right after the Second Karabakh War, we celebrated its liberation together.

Through the vision of our Presidents, our relations continue to improve.

Today, cooperation between Türkiye and Azerbaijan constitutes a unique example for other friendly countries in our region.

Ladies and Gentlemen,

The Asian Parliamentary Assembly was born out of a collective desire to promote peace across the world in general and in Asia in particular.

Today we face enormous global challenges threatening peace stability and shared prosperity in the world.

These challenges require an effective international response.

The rise of Asia provides an important opportunity to take tangible steps.

Türkiye is committed to work together with Asian partners, at bilateral as well as regional levels, to enhance and solidify Asian solidarity and unity.

This is also in line with the primary objectives of Türkiye's Asia New Initiative.

The Initiative was announced four years ago to better capitalize on Türkiye's potential as a geopolitical center of regional and global cooperation.

Under the Initiative, we are prepared to explore opportunities in all areas of cooperation on the basis of shared interests and objectives.

We are also prepared to put forward our contributions to make the international relations more fair, inclusive and sustainable.

Ladies and Gentlemen,

Today we have important items on our agenda ranging from protecting our cultural heritage to promoting the right of women and children in our societies.

We should start by promoting dialogue on cultural and social issues if we would like to have an effective cooperation across Asia.

Migration is high on our agenda.

Türkiye is the number-one refugee-hosting country in the world.

However, I would like to remind you that the migration issue is not just one country's issue and cannot be overcome by the efforts of just one country.

For this reason, there is a need for real and solid cooperation on the migration. Otherwise, this issue may negatively affect all countries.

Humanitarian and development assistance are necessary, while ensuring peace, stability and sustainable development in the long term is essential.

On the other hand, legal channels for migration should also be a part of comprehensive migration

policies.

As parliamentary diplomacy has been gaining significance to address the regional challenges, we deem a discussion on the institutional steps for increasing APA's effectiveness very timely and important.

Parliamentary diplomacy is one of the most promising instruments of soft power.

From this viewpoint, watching the regional and global developments and problems a distance is not an option for us.

It is our main responsibility to strengthen interparliamentary cooperation in the areas of peace, welfare, economic and social relations in the Asian region.

Human-centered development, good governance and enhanced institutional capacity will continue to be at the heart of our efforts.

That is why Antalya Declaration, adopted at the 13th APA Plenary session in Antalya underscored the importance of strengthening of multilateralism, making international organizations more efficient and transparent, global governance and the international rule-based order.

Therefore by being here today, we once more underline the utmost importance of interparliamentary relations and parliamentary diplomacy to promote our common interests and values.

Ladies and Gentleman,

On the occasion of this meeting, I sincerely congratulate brotherly country of Azerbaijan's term presidency. I am sure that this period will make significant contributions to the activities of the Asian Parliamentary Assembly.

Last but not least, I am confident that our meeting today will contribute further to our efforts in this regard.

Thank you for your attention.

Attachment III

## Asian Parliamentary Assembly

### Standing Committee on Social and Cultural Affairs



**Baku, Republic of Azerbaijan  
20-23 September 2023**



## Draft Agenda

(7/31/2023 by APA Secretariat)

1. Adoption of the Agenda
2. Election of Bureau
3. Opening Remarks by Chairperson
4. Report by APA Secretary General
5. Situation of Women Parliamentarians in Asia
6. General Debate on Draft Resolutions
7. Consideration of Draft Resolutions:
  1. Resolution on Measures to Promote Cultural Diversity and Protect Cultural Heritage in Asia
  2. Resolution on Asian Integration through Information and Communication Technology
  3. Resolution on Collaboration on Health Equity in Asia
  4. Resolution on Asian Parliamentarians Against Corruption
  5. Resolution on APA Women Parliamentarians
  6. Resolution on Promoting Dialogue and Harmony among Followers of World Religions
  7. Resolution on Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia
  8. Resolution on Effective Cooperation in Combating Illicit Drug Trafficking in Asia
  9. Draft Resolution on Humanitarian Aid to Syria, Iraq, Yemen, Gaza and Myanmar on the Verge of the Humanitarian Catastrophe (Deferred)
  10. Draft Resolution on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia (Deferred)
  11. Resolution on the Promotion of Quality Child and Youth Development for Sustainable Society in Asia
  12. Resolution on Ageing Society in Asia
  13. Resolution on Human Development in Asia
  14. Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia (New)
  15. Draft Resolution on Sustainable Tourism Cooperation in Asia (New)
  16. Draft Resolution on the Commission on Women (New)
8. Closing Session
9. Any other Matters

Attachment IV

## Opening remarks by the Chairperson

**Dear colleagues, dear gueats!**

The Asian Parliamentary Assembly (APA) and its respective committee are holding a meeting in Azerbaijan for the first time. I am very glad to welcome all our colleagues to Azerbaijan, the first country that established the first Democratic Republic in the Muslim East in 1918 and gave women the right to elect-to be elected in this great geography.

I am particularly proud that the meeting of the APA Standing Committee on socio-cultural issues is being held on the eve of the 3rd anniversary of the liberation of the city of Shusha which is the cultural capital of Azerbaijan and beautiful Karabakh from Armenian occupation.

When Azerbaijan liberated its lands from the 30-year occupation of Armenia, we witnessed unprecedented vandalism against cultural and religious monuments there. Uzeyir Hajibeyli, whose monument was shelled and the house museum was destroyed, is the genius of Art who wrote the first opera in the East; Khurshidbanu Natavan, whose monument was shelled and the House Museum and grave were destroyed, was an outstanding female poet of the East, a kind statesman who ruled Karabakh in the XIX century. The name of another luminary artist, whose monument was shelled and the house museum was destroyed, will also be familiar to you: this is the world-famous opera singer Bulbul... The fate of all three of them, many more artists, cultural and art figures, was connected with the cultural capital of Shusha. It is no coincidence that Shusha was called The “Conservatory of the Caucasus”; again, it is no coincidence that Shusha is the “cultural capital of the Turkic world” for 2023. After the completion of the repair and reconstruction works carried out in Shusha, we will hold a meeting of the APA and its Committee on socio-cultural issues there, and you will get acquainted with the sad and proud history of the cultural capital, which has brought up geniuses.

I am sure that the socio-cultural construction work carried out in Shusha will please you, and it will appear before you as an example and model of the transition from the lack of culture during occupation to culture of freedom, from freedom to improvement.

Azerbaijan is a country that has the function of not only a geographical, but also a cultural and spiritual bridge between Europe and Asia. Azerbaijan with rich cultural traditions and ancient history has been a hotbed of friendship, brotherhood, trust, hospitality, peacefulness, tolerance and kindness for hundreds of years.

Having regained its state independence in 1991, Azerbaijan began to play a specific cultural, spiritual, as well as economic and commercial role between Europe and Asia as a result of the wise policy of national leader Heydar Aliyev, whose 100th anniversary we celebrated this year. The national leader’s strategy is currently being successfully continued and developed by President Ilham Aliyev. At present, Azerbaijan is a transit or start-up country of major energy projects between

Asia and Europe, as well as a country that initiates and, despite all the difficulties, implements important international energy, transport and economic projects.

Azerbaijan actively participates in Asian organizations, as it does in European organizations, and is an active member of the Non-Aligned Movement, which brings together many Asian countries, and does not spare its contribution. This, in its turn, serves the promotion and implementation of international law, peace, development, social welfare, protection of cultural heritage, in other words, the welfare.

Cooperation with the Asian Parliamentary Assembly, built on these values, is of great importance for Azerbaijan. The organization puts efforts to solve the common problems facing the Asian states, and we should all do our best in this direction. The purpose of our meeting here is to adequately respond to the challenges and problems existing in the region by combining our trust and strengthening cooperation.

The first meeting of the APA Standing Committee on socio-cultural issues in Azerbaijan is a significant event for us. We believe that the decisions to be made in Baku, the initiatives to be put forward, the ideas will serve the interests and common values of the people, without allowing double standards in our common home, the Asian geography. We believe that Azerbaijan will contribute more to the work of APA and the development of our common home in this context.

Our Sufi grandfathers used to say: “the world is our home.” If there is a fire in this house, we will all suffer from that fire one day. Everyone should mobilize to extinguish the fire. We must also proceed from common interests and the principles of humanism in resolving issues that concern Asia today. I hope that this meeting will be held in the spirit of cooperation.

Strengthening the role of APA in this direction serves universal interests.

**Dear Committee members,**

We are waiting for the discussion of 16 important draft resolutions, 3 of which are new. These new drafts are also very important, I ask you to pay special attention to these draft resolutions.

The draft resolution put forward by Turkey and Iran is associated with sustainable tourism cooperation in Asia. Naturally, this is an important issue, the sound discussions we will hold here will benefit the common cause.

Another draft resolution is related to the creation of a new Commission on women in APA. I would like to thank the secretariat very much that this proposal put forward by Azerbaijan at the meeting held in Turkey was met with high respect. In this regard, we have worked hard on the relevant draft and submitted it to the secretariat, and you also got acquainted with this document.

Our country, whose first vice-president and speaker of the parliament is a woman, has always put efforts to contribute to this issue at the international level by creating a relevant State Committee



on women's Affairs and a special committee in the parliament, which attaches great importance to expanding the opportunities for women's participation in socio-cultural life, including public administration.

We want successful practices in the APA member countries to be mutually studied, the best models to be appreciated and disseminated. We consider the establishment of this Commission important and believe that the establishment of the APA Commission on women will be very important and useful for all of us, for all member countries.

**Dear friends,**

As you know, Azerbaijan has officially put forward its candidacy for the presidency of the APA for 2024-2025. We will do our best to achieve the overall goals of the organization, to further strengthen cooperation between Asian states and to increase the role of the organization.

I hope that our candidacy will be supported by the members of the organization, and together we will achieve even greater success.

I know that many of you came to our country for the first time, but I have no doubt that this will not be your last visit, we will see you in Azerbaijan again and we will be able to hold new discussions. I am glad that during your stay in Baku you have the opportunity to see the sights of our city, to get acquainted with the rich Azerbaijani culture, and I believe that you will leave here with great sentiments.

Once again I express my gratitude to all of you for accepting our invitation and participating in this event.

I would like to express my deep gratitude to the chairman of the Milli Majlis of Azerbaijan Sahiba Gafarova, APA secretary general and all employees of the Secretariat who contributed to the high level organization of our meeting. We work in the spirit of cooperation with the APA Secretariat at a very high level, and I would like to thank them for their support.

I wish success to the work of our committee and I am sure that the meeting will be very fruitful.

Attachment V



## Asian Parliamentary Assembly

### Standing Committee on Social and Cultural Affairs

#### Baku- Republic of Azerbaijan

20-23 September 2023

#### Report of the Secretary General

**Madam Chairperson,  
Distinguished Delegates,  
Dear Colleagues,**

It is my great pleasure and honor to welcome you all to the third APA Standing Committee meetings being held in year 2023. I welcome and appreciate all APA member parliaments participating at this important meeting. Let me also seize this opportunity to thank the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan for organization this meeting and generous hospitality extended to us.

**Dear Colleagues,**

As you may recall, at its virtual meeting of 14 July 2021 in Tehran, the Standing Committee on Social and Cultural Affairs had thirteen draft resolutions in its Agenda. Two new draft resolutions on tourism were also submitted by the delegations of Iran and Turkiye. The Meeting adopted 11 draft resolutions and consideration of the two new drafts and the ones on “Humanitarian Aid” and “Rights of Migrant Workers” were deferred to the next Standing Committee meeting.

At this meeting, we also have a new draft resolution on the “Commission of Women” proposed by the Republic of Azerbaijan.

The proposed draft resolution is a timely one and as a matter of fact expands the scope of the Special Committee on APA Women Parliamentarian and the Resolution on APA Women Parliamentarians.

Approval of this draft resolution by

the SC, also prepares the ground for the establishment of the “APA Commission on Women” as proposed by Azerbaijan.

My today’s report consists of two separate parts with an enlightening focus on two categories of “outstanding” and “challenging” issues of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs.

## A. Outstanding Issues

Certain SC resolutions contain some outstanding features that due to its importance, we have to consider them carefully at this session and come out with a positive suggestion on them:

### 1. Establishing an award to promote cultural diversity

In APA Resolution on “*Measures to Promote Cultural Diversity and Protect Cultural Heritage in Asia*”, Member Parliaments are called to support establishing an award to be presented annually to outstanding Asian artists, authors, poets, film makers, painters, who best convey the APA’s commitment to cultural diversity in Asia. After several years passing, we have not yet reached any decision on this call. I wish to propose that one of the participating parliaments at this meeting be volunteered to deliver this award annually to promote cultural diversity in our continent.

### 2. Creating Asian Virtual Parliament

APA Resolution on “*Asian Integration through Information and Communication Technology*”, underlining that the creation of Asian Virtual Parliament will pave the way for sharing information, harmonizing legislation and raising people’s awareness about the activities of the legislative body and ensure more profound feedback between society, power and individuals, and thus contribute to strengthening peace in Asia. It calls also on APA Member Parliaments to volunteer for providing knowledge and know-how, technical assistance, financial support, human resources in creating a “Virtual Asian Parliament”.

There is no doubt that in today’s world and in particular with the valuable experiences that we have earned during the Covid -19 outbreak, we have to accelerate the process of creation of the Asian virtual parliament.

### 3. Establishing W.G to consider APA Plan of Action on Combating Corruption

The Resolution on “Asian Parliamentarians against Corruption” decides to set up a working group under the auspices of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs to further consider the “APA Plan of Action on Combating Corruption”.

To this end, we should prepare the ground for the implementation of this decision and establish the working group as soon as possible to consider the APA Plan of Action on Combating Corruption. It is expected that the member parliaments particularly delegations with more interest and experience in anti-corruption efforts to step forward and offer their assistance to establish the working group.

### 4. Formation of a separate Corps Unit

The Resolution on “Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia”, expresses support for the formation of a separate Corps Unit from APA Member Parliaments to protect and safeguard historical cultural properties from the perils of unlawful excavations, theft and smuggling.

We had not yet made any progress or show of interest on the implementation of this proposal and I hope at this meeting we could reach to a conclusion on this matter.

## 5. creating a technical and professional training centre

APA Resolution on “Human Development in Asia” Suggests creating a technical and professional training center under the umbrella of the APA to provide joint efforts to push sustainable development forward. Regarding this suggestion we have not done anything so far, and we should take care of it at this meeting too.

## 6. Assign part of APA website to women parliamentarian

Under the Resolution on “APA Women Parliamentarians”, it is requested that the APA Secretariat assigns one part of its website to women parliamentarians of Asia. As I informed you in my previous report to the Committee, a part of the APA website is allocated to the activities of the women parliamentarians of Asia and I wish to encourage all women parliamentarians to use this page for their networking activities.

### Dear Colleagues,

I raised above some of the outstanding issues left unnoticed in the Agenda of committee for several years. There is no doubt that progress on and implementation of such issues require the will and interests of all APA member parliaments and their commitments to the APA noble goals and mission.

## B. Challenges and innovative ideas

I would like to touch on certain challenges facing us and raise some innovative ideas to encourage more active participation and contribution on the part of all APA member parliaments:

- There are 16 draft resolutions before this Committee which mostly need to be reconsidered, updated, merged, modified or even placed with its relevant context on the agenda of the other three Standing Committees to keep up effectively conducive to the currently ongoing global issues.
- Likewise the other three Standing Committees, there are several draft resolutions before this Committee which have remained for long time with no substantial changes in the absence of an established rules of procedure to take them off the agenda.
- Just like other international and regional organizations after COVID-19 pandemic period, APA should try hard to get actively and lively engage in all matters relevant to the regional and international affairs. The APA Member Parliaments are expected to actively contribute and share their innovative ideas, plans and projects in the framework of the Standing Committees.
- During the past years, I, in my capacity as Secretary General and as an academician, have devotedly tried to introduce and raise innovative ideas and plans in my reports and statements in all APA gatherings with the aim of keeping track of social, cultural, political, economic and legal discourses at regional and international arena.

**Dear Colleagues,**

Finally, I would like to once again underline the need of reform and revitalization of the work of the APA in order to overcome the challenges and make best use of our organization. We at the Secretariat believe that at present and until the time that the APA restructuring process comes to its conclusion, the APA Bureau constitute a well versed entity to shoulder the tasks enumerated above and decides accordingly at its meetings.

Finally, I wish you a very lively, constructive and fruitful deliberation at this SC session.

Thank you very much for your attention

Attachment VI

**ASIAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY (APA)**

**Presentation of the draft resolution on the establishment of the “Commission on Women”.**

**Dear colleagues,**

I would like to bring to your attention the draft resolution on the establishment of the “Commission on Women” proposed by the Azerbaijani delegation at the 13th Plenary Session of the Asian Parliamentary Assembly held in Antalya, Turkey, on January 10, 2023.

But I would first like to share some thoughts with you. It is a fact that I personally have always demanded more rights for women. Not because I too am a woman. But because as a woman, I know very well what women have to go through. I am aware that it is not an easy task to present the draft resolution on the establishment of the “Commission on Women” in a meeting with mostly male participants. But I believe that you will approach this topic in light of the words of the Prophet of Islam, Hazrat Muhammad, who said “heaven lies beneath the feet of mothers”.

The founder of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk, who signed off on the biggest achievements related to women’s rights in the country, said: “We must believe that everything we see in the world is the work of women.”

The founder of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk, who signed off on the biggest achievements related to women’s rights in the country, said: “We must believe that everything we see in the world is the work of women.”

“No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. It is a crime against humanity that our women are shut up within the four walls of the houses as prisoners. There is no sanction anywhere for the deplorable condition in which our women have to live” - these wise words belong to Muhammad Ali Jinnah, an outstanding socio-political and statesman who created a great transformation regarding women’s rights in Pakistan. Declaring the expansion of the role of women in the society as one of the priorities of the state, the National leader of Azerbaijan Heydar Aliyev said: “Women in the society always have great responsibilities, their work is always difficult. However, they fulfill these duties with honor and, as always, play a leading role in society.” Thus, I believe that each of you will support this document by following the example of historical figures in your country who gave great importance to women’s rights, their place and role in society and took important steps.

“Being a woman is a terribly difficult task, since it consists principally in dealing with men,” said Joseph Conrad, and we want to tell men with this draft document

that the problem of women is not to fight with men, but the problem of women is to build a more beautiful and livable world together with them. With this document, we want to convey the message “To all the little girls watching this gathering, never doubt that you are valuable and strong, and that you deserve every opportunity in the world to realize and achieve your dreams.” – Without distinguishing between men and women, with a strong spirit of unity!

Think about it, is it acceptable that the principles of human rights contained in UN documents do not cover at least 1 in 4 people of the world today?

Yes, a country’s economy rests on its human capital. Indeed, if you do not provide women with adequate health, education and employment opportunities, you are missing half of your potential. Gender equality and women’s rights are the foundation of economic development.

Gender equality is not just a goal. Gender equality is fundamental to poverty reduction, sustainable development and good governance.

**Dear friends,**

You had the opportunity to get acquainted with the discussed draft resolution and the related conceptual document as it was distributed by the APA Secretariat to the members of the organization.

The factors determining the relevance of the creation of the “Commission on Women” are widely reflected in the mentioned documents.

Despite the implementation of certain measures and many efforts to protect women’s rights and eliminate gender discrimination in the Asian region, there undoubtedly are serious problems in this area.

Unfortunately, Asia has now become one of the most unstable regions in the world, and cases of violence occurring during regional conflicts and armed conflicts in the area are being implemented against civilians as well. During armed conflicts, women and children become the most vulnerable social group. They experience the consequences of violence, violations of rights, and suffer from becoming refugees, loss of residences, loss of close relatives, poverty, and family breakdown.

Conflict exacerbates pre-existing forms of discrimination against girls, and women in general, and puts them at greater risk of human rights violations.

Trafficking of women, violence against women, domestic violence, exclusion of girls from education, existence of early marriages, sexual selection (abortions based on sex selection) are also widespread in the Asian region.

In the concept paper we present to your attention, we discuss relevant statistics based on official reports of UN specialized agencies on violations of women’s rights and violence against women in the Asian region.

It goes without saying that the violation of women's rights and the existence of gender discrimination are among the biggest problems in the field of human rights in modern times.

We are sure that if the states and international organizations do not take urgent measures to solve the mentioned problems, the risk of worsening the current situation will increase.

We, as APA members, must do our best to solve existing problems, realizing that the violation of women's rights and gender discrimination is a serious enough problem in Asian countries. In this context, we consider it appropriate to establish a "Commission on Women" within the APA.

The new institution to be created can act as an effective mechanism for systematically keeping issues related to women's rights and gender equality on the agenda.

I am sure that the creation of the "Commission on Women" will help to mobilize the efforts and resources of parliamentarians who are members of the APA to draw attention to the problems related to women's rights and gender equality, to increase systematic awareness on this issue, to increase the political, economic, social, and cultural rights of women, and will serve to create conditions for them to fully exercise their civil rights. It will also facilitate projects and measures aimed at increasing awareness of the situation of women in member states, strengthening the legal framework for the protection of women and girls, and improving their situation in order to end violence and gender discrimination. We believe that thanks to the creation and organization of this commission, national institutions will be strengthened to improve the status of women, and gender equality issues will be taken into account within the framework of the APA's activities.

Regarding the Commission's functions and action mechanisms, the Commission can act as a mechanism for collecting information on the situation of women's rights and gender equality in the member states. Also, we believe that the new institution will contribute to the process of discussing issues related to women's rights and gender equality, listening to reports, accepting draft resolutions, recommendations, and solving existing problems within the framework of APA. The Commission may encourage the preparation of annual reports on the situation of women in the member states of the Assembly, and ensure the presentation of a report on women's rights and gender equality in the member states in its plenary sessions. The activity of the Commission can be effective in terms of supporting the implementation of gender quotas regarding the composition of delegations in the APA, organizing a support mechanism for women deputies, promoting the establishment of relations between the committees on women's issues existing in national parliaments and the APA, holding relevant seminars and consultations.

The draft resolution also contains a provision dedicated to the structure of the newly established Commission. Thus, it is suggested that the Commission should consist of one representative of each parliament that is a member of APA. It is planned to elect the chairman, vice-chairman and speaker in the commission, taking into account the fair geographical distribution. The chairman, vice-chairman and speaker will be elected for a two-year term of office on the basis



of consensus among APA members. The Commission's annual meeting is expected to be convened by the member parliament that hosted the last Plenary Session. Based on the mutual consent of the Chairman and the Permanent Secretariat, it is also possible to hold the Commission meeting in another member parliament (the provision on holding the annual meeting of the Commission is based on provision 15.3 of the Rules of the Plenary Session of the Asian Parliamentary Assembly). I would like to note that the provision related to the structure of the draft resolution was formed as a result of consultation with the APA Secretariat.

I think that all of us understand the importance of establishing the Commission. The new structure will really revive the activity of the organization, increase its effectiveness, and make a significant contribution to the elimination of discrimination against women in Asian countries. This depends on us. I believe that you will support us in this work.

Thank you all in advance!

# Draft Resolutions of the Standing Committees on Social and Cultural Affairs

1. Draft Resolution on Measures to Promote Cultural Diversity and Protect Cultural Heritage in Asia
2. Draft Resolution on Asian Integration through Information and Communication Technology
3. Draft Resolution on Collaboration on Health Equity in Asia
4. Draft Resolution on Asian Parliamentarians Against Corruption
5. Draft Resolution on APA Women Parliamentarians
6. Draft Resolution on Promoting Dialogue and Harmony among Followers of World Religions
7. Draft Resolution on Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia
8. Draft Resolution on Effective Cooperation in Combating Illicit Drug Trafficking in Asia
9. Draft Resolution on Humanitarian Aid to Syria, Iraq, Yemen, Gaza and Myanmar on the Verge of the Humanitarian Catastrophe (Deferred)
10. Draft Resolution on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia (Deferred)
11. Draft Resolution on the Promotion of Quality Child and Youth Development for Sustainable Society in Asia
12. Draft Resolution on Ageing Society in Asia
13. Draft Resolution on Human Development in Asia
14. Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia
15. Draft Resolution on the Commission on Women



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/01

22 September 2023

Azerbaijan

## Draft Resolution on Measures to Promote Cultural Diversity and Protect Cultural Heritage in Asia

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Recalling** APA Resolutions, APA/Res/2013/05; APA/Res/2010/05; APA/Res/2009/05; APA/Res/2008/17; and APA/Res/2007/02; on Protecting and Respecting Cultural Diversity in Asia;

**Also Recalling** the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, adopted by the UNESCO General Conference at the 31st session, held in Paris on November 2, 2001”;

**Considering** the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954, and its protocols and UNESCO 2005 Convention on Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expression;

**Recognizing** the significant role of parliaments both in safeguarding their respective national cultural heritage and in harmonizing Asian approach in respect of cultural diversity;

**Emphasizing** that protection, conservation and management of the diverse Cultural and Natural heritage of Outstanding Universal Value in Asia declared under the Convention concerning *the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, 1972 is the responsibility of its member states and joint collaborative efforts, wherever necessary, may be made towards their safeguarding for posterity;

**Recalling** the UNESCO 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage; and UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage;

**Reaffirming** that cultural heritage is a fundamental component of the cultural identity of a people and their social cohesion, and its disrespect, damage or destruction may have adverse consequences for human dignity and human rights;

**Recognizing** that tolerance is one of the fundamental values of humanity, which entails promotion of cultural diversity, culture of peace, and dialogue among civilizations;

**Also Recognizing** the increasing importance of culture, as an integral part of development plans of all nations in Asia and beyond;

**Promoting** greater understanding and respect among civilizations, cultures and religions by means

of concrete projects in the priority areas of youth, education, and media, in collaboration with governments, international and regional organizations, in line with the outcome of the first World Cultural Forum, in Bali, Indonesia in November 2013 and document entitled “Bali Declaration on the Alliance of Civilizations”, held in Bali, Indonesia, in 29 and 30 August 2014;

**Noting** the active role of the Republic of Azerbaijan in promoting intercultural and interreligious dialogue by hosting the Seventh Global Forum of the Alliance of Civilizations in 2016 and the summits of the World Religious Leaders in 2010 and 2019, as well as through biennial World Forum on Intercultural Dialogue organized in partnership with UNESCO, UNAOC, UNWTO, the Council of Europe and ICESCO within the “Baku process” and #Peace4Culture Global Call initiated in partnership with UNAOC and ICESCO;

**Reiterating** that multicultural dynamism in Asia provides as an indispensable asset for making a strong Asian community based on mutual respect and recognition of all Asian cultures and civilizations;

**Acknowledging** that Cultural heritage has always been considered as an important resource for tourism and indispensable element for gaining knowledge about country’s history and culture;

**Recognizing** the significance of responsible tourism on local economies and the global cultural exchange;

**Also Noting** that globalization creates some opportunities for greater interaction among cultures and civilizations while bringing about challenges in preserving and celebrating the rich intellectual and cultural diversity in Asia;

**Realizing** that the establishment of the Asian Cultural Council (ACC) under the framework of the International Conference of the Asian Political Parties (ICAPP) shall serve as an important platform for culture of peace, sustainable development, human connectivity and innovation at the Siem Reap Declaration;

**Recalling** the 1970 UNESCO Convention on Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property to protect the cultural heritage in Asia;

**Considering** that the smuggling of cultural objects from Asia poses a threat to the richness of Asian cultural heritage and underlines the important role of parliaments to both raise public awareness about this challenge and to strengthen it, where necessary;

**Deploring** the unrepairable damage brought to cultural and religious heritage by terrorism and organized crimes, especially damages to all religious and historical sites and holy shrines by indiscriminate bombing and shelling in Syria, Iraq, Afghanistan and Yemen;

**Condemning** Israeli attacks on Al-Aqsa mosque, the excavations and infringements on all Islamic and Christian holy sites in the 1961 occupied Palestinian territories and refuse Israel's<sup>1</sup> failure the Occupying Power to comply with UNESCO resolutions concerning the Old City of Jerusalem and its walls<sup>2</sup>;

**Also Condemning** the loss, destruction, removal, theft, pillage, illicit movement or misappropriation of and any acts of vandalism or damage, directed against cultural property in areas of armed conflict and territories that are occupied;

**Expressing** grave concerns regarding theft, damage, or destruction to any place of worship of any religion, cultural, religious, or historical heritage in Asia;

*We therefore,*

1. **Determine** to encourage and promote further intercultural dialogue and inter-religious exchanges throughout Asia;
2. **Resolve** to appreciate and promote the benefits of diversity and good governance among Asian nations, and encourage values such as justice, human rights, non-discrimination, democracy and respect within and among communities and nations;
3. **Reject** all manifestations of discrimination that are based on racism, xenophobia and all other related forms of intolerance;
4. **Remain Committed** to the protection of the rights of all communities, where applicable, so as to ensure the fulfillment of community rights;
5. **Urge** relevant governmental agencies to further facilitate consular services as appropriate for citizens of Asian countries to allow for greater people-to-people interaction;
6. **Acknowledge** that illegal import, export and transfer of ownership of cultural property and artifacts are responsible for the impoverishment of the cultural identity of the countries of origin of such property;
7. **Decide** to remain cognizant of damages to religious holy places and historical sites by ISIS and other terrorist organizations in our home continent;
8. **Resolve** to cooperate to prevent illegal import, export or transfer of cultural property and artifacts among Asian countries and beyond;
9. **Urge** Member Parliaments to consider ratifying the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage;

<sup>1</sup> Iran registered its reservation on word "Israel"

<sup>2</sup> The Philippines registered its reservation on whole para

10. **Call Upon** all Member Parliaments to promote tolerance and empathy among Asian nations with a view to diminish distrust, misunderstanding, and conflict among religious communities;
11. **Strongly Recommend** APA Member Parliaments to promote tourism in association with conservation and protection of cultural heritage;
12. **Reiterate** that during armed conflict, states should adopt measures to safeguard the cultural and natural heritage of a nation in conformity with international law and the principles and objectives of international agreements and UNESCO recommendations concerning the protection of such heritage during hostilities;
13. **Emphasize** on the illegality of any change brought about by the Israeli occupation in the Old City of Jerusalem and its surroundings, as it is included in the list of World Heritage in Danger, and rejecting any change in its historical, civilizational, religious and cultural character, in violation of international conventions, such as the Geneva and Hague Conventions, and the relevant UNESCO and UN Security Council resolutions, which considered all these measures null and void, and demanded their immediate halt, and allow the UNESCO mission to investigate the facts about the excavations and tunnels carried out by the occupation under the blessed Al-Aqsa Mosque;
14. **Reiterate** that Member Parliaments should adopt measures to safeguard and restore the cultural and natural heritage of nations in conformity with International law and the principles of objectives of international agreements and UNESCO recommendations concerning the protection of such heritage during hostilities, including those caused by conflicts and violent extremism;
15. **Request** the APA Secretary General to uphold cooperation between APA and international and regional organizations such as UNESCO, United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), ISESCO, Asia Cooperation Dialogue (ACD) and relevant Asian NGOs active in promoting cultural diversity and dialogue among civilizations;
16. **Call upon** APA Member Parliaments to support establishing an award to be presented annually to outstanding Asian artists; authors, poets, film makers, painters, etc. who best convey the APA's commitment to cultural diversity in Asia;
17. **Encourage** the parliamentarians to support their governments outreaching to civil society about the importance of cultural diversity in societies and developing strategic plans and projects to develop the cultural sector to promote dialogue among civilizations and cultures based on mutual respect, towards consolidating the concept of humanity and promote human rights, dignity, and identity;
18. **Stress** on the important role the private sector can play in promoting cultural diversity, encouraging the development of plans and mechanisms to create a space for dialogue between the private and public sectors to develop plans to manage, protect, and promote cultural diversity in Asia;

19. **Also stress** on the important role the parliamentarians can play in developing policies and legislation to promote the principles enshrined in the UNESCO World Day for Cultural Diversity in their countries and to develop appropriate mechanisms for developing plans and regulatory frameworks to manage the cultural heritage sites, by identifying the cultural importance of these sites, maintaining their authenticity and preserving their value while respecting international laws for cultural diversity;
20. **Call upon** the APA Member's Parliaments to support the cultural diversity including respect to regional and national particularities and various historical, cultural and religious backgrounds regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms, as part of intangible asset and heritage of human culture.
21. **Encourage** the member states of the Asian Parliamentary Assembly to enhance the status of their archaeological sites, by promoting their history and importance locally and regionally, and attract the public thereto through innovative events and programs, in addition to activating the role of the surrounding local community and encouraging cooperation with all private and public institutions to improve their conservation and preservation efforts.



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/02  
22 September 2023  
Azerbaijan

## Draft Resolution on Asian Integration through Information and Communication Technology

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Reaffirming** that right of access to accurate information is an integral part of the fundamental right of freedom of expression, as recognized by Resolution 59 of the UN General Assembly adopted in 1946, as well as by Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (1948) bearing in mind its article 29 and limitations therein, and the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) in compliance with its article 19 in particular respecting rights of others, national security or order, national health and morals ;

**Recalling** para.5 of Article 3 of the APA Charter;

**Also Recalling** WSIS<sup>3</sup> Outcomes of 2003, 2005 held under UN aegis to build a people centered, democratic, inclusive and development oriented information society and UN resolution 125 of the UN General Assembly adopted at its 70<sup>th</sup> session in 2016 on High level review of WSIS+10 on global ICTs development and measures to facilitate accomplishment of SDGs;

**Noting** APA Resolution, APA/ Res/ 2014/11, and APA/Res/2014/13;

**Underlining** that Asian integration can be achieved through further dialogue, interaction, and communication among Asian people, parliamentarians, government officials, academic and educational institutions, and media for the promotion of peace, liberty, equality, human rights, and welfare in Asia;

**Acknowledging** the fundamental role of information and communication technology as an indispensable factor in all areas of national; regional, and global development;

**Awaring** that cyberspace is susceptible to any acts of cyber warfare that could cause disruption due to data and information leakage;

**Recognizing** the fact that today Asia encompasses the biggest market in the world, the highest number of population; the largest amount of foreign currency reserves; and dynamic economic growth;

<sup>3</sup> World Summit on Information Society held under the aegis of UN and ITU in 2003 and 2005



**Reaffirming** the deep-rooted ties of history, geography, economy, culture, and civilization that bind Asian peoples together and the common interests pointing to the need for further cooperation;

**Emphasizing** on the principle of flow of information, privacy protection within the domestically applicable moral and legal frameworks and also equitable access to communication and access to new technologies at the national, regional and global levels;

**Deeply concerned** by the proliferation of fake and fabricated news, misinformation and disinformation resulting due to misuse of Information and Communication Technologies (ICTs) which generate sentiments, hostility and divisiveness among communities and highlighting the accountability and responsibility of big tech companies in this regard;

**Stressing** the view that global networking provides opportunities for APA Member Parliaments to share experiences and engage in fruitful dialogue on significant issues in Asia and facilitates further cooperation and coordination, on the way of Asian integration process;

**Also underlining** that the Asian Virtual Parliament will pave the way for sharing information, harmonizing legislation and raising people's awareness about the activities of the legislative body and ensure a more profound feedback between society, power and individuals, and thus contribute to strengthening peace in Asia;

**Emphasizing** that, the role of parties, civil society, non- governmental organizations (NGOs) and other democratic structures in public sphere, provide opportunities in Asian countries for exchange of views, interactions and synergy to promote regional and global cooperation in order to reinforce the long term process for Asian Integration;

**Welcoming** the active implementation of the "Digital Silk Road", which aims to create a new telecommunication backbone route between Europe and Asia by utilizing the existing capabilities/ infrastructure of interested countries in the region;

*We therefore,*

- 1. Call upon** and emphasis APA Member Parliaments to volunteer for providing knowledge and know-how, technical assistance, financial support, human resources; and other forms of assistance in creating a "Virtual Asian Parliament" based on the report of APA Secretary General on the subject matter in order to enhance collaboration and interaction among parliaments and parliamentarians in Asia and as a prelude to establishing a model of Asian Parliament;
- 2. Determine** the modern and traditional ways to help to complete a plan to promote, publicize and disseminate accurate information amongst citizens within the APA region, including through the use of social media;

3. **Recognize** that information and communications technologies present new opportunities and challenges and that there is a pressing need to address the major impediments, in particular unilateral coercive measures, that developing countries face in accessing the new the new technologies, such as an appropriate enabling environment, sufficient resources, infrastructure, education, capacity, investment and connectivity;
4. **Call upon** APA Member Parliaments to support vocational and technical education and capacity building in Asia in order to enhance people’s digital literacy, skills and competitiveness in coping with the challenges of globalization based on digital technologies;
5. **Urge** APA Member Parliaments to share best practices and exchange experiences with a view to inspiring a common approach toward Asian integration through holding special workshops and forums among Asian Member Parliaments;
6. **Also call upon** the UN, its specialized agencies, affiliated organizations, particularly ITU, the UN Specialized agency in ICTs, to support the Members of this Assembly through collaboration transferring in improving access to ICTs and ICT-enabled services and technologies for the undeserved in the region in partnership with regional organizations in particular Asia Pacific Tele-community with an aim to bridge the digital divide and transfer of technologies and UNESCO, to support the Members of this Assembly to surmount the hurdles, identified by research centers, think tanks and intellectuals, hampering circulation of ideas through available means and for flow of communication and information subject to national legal and morals frameworks;
7. **Aware** that cyberspace is susceptible to any acts of cyber warfare that could cause disruption due to data and information leakage;
8. **Exhort** APA Member Parliamentarians to collaborate and take necessary measures to promote the development of ICT infrastructure through enabling policies, capacity building, building confidence and security in the use of ICTs, inter alia;
9. **Request** APA Member Parliaments to promote parliamentary action to address the proliferation of fake and fabricated news, misinformation and disinformation caused by the misuse of ICTs and include initiatives to make digital platforms including social media responsible and accountable for their behavior in ICTs environment by promoting, information awareness, fact-checking collaboration and the establishment of complaint procedure mechanism, where necessary, without limiting the Asian Citizen’s fundamental rights to know and freedom to access information as well as freedom of expression;

10. **Call upon** the international community to establish a specialized organization whose role is to reduce the risks of ICT abuses and detrimental impact thereof on all countries of the world, and to enhance cooperation in the fields of cybersecurity among the member states of the Asian Parliamentary Assembly to protect against potential digital threats.
11. **Invite** the APA Secretary-General to seek possible technical and financial assistance from Member Parliaments and other institutions to facilitate the implementation of this resolution and prepare a report with comprehensive approach to accelerate the process of Asian Integration.



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/03  
22 September 2023  
Azerbaijan

## Draft Resolution on Collaboration on Health Equity in Asia

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Recalling** APA Resolutions, APA/Res/2013/07; APA/Res/2010/02; and APA/Res/2009/06;

**Also recalling** the report of the Secretary-General on Achieving Health Equity in Asia, SG/Rep/2011/02 Dated 22 August 2011, submitted to the meeting of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs held in Tehran, Islamic Republic of Iran on 13-14 September, 2011;

**Welcoming** the Report of the Secretary-General contained in SG/Rep/2014/02 dated 10 August, 2014;

**Underlining** the report of WHO Commission on Social Determinants of Health for addressing the impact of socio-economic inequalities on health at global, regional and national levels;

**Noting** Alma Ata Declaration adopted on 6-12 September 1978 which defined differences in health as a common concern of all countries and invited all to work towards the highest attainable standard of health for all and to reduce the gap between health status, and Astana Declaration adopted on 25-26 October 2018 reaffirming the commitments expressed in Alma Ata Declaration;

**Taking note** of difference of health equity status among countries in Asia;

**Welcoming** the Sustainable Development Goals adopted on 25 September 2015 and reaffirming their pivotal role in enhancement of the health equity;

**Also welcoming** the Political Declaration of the High-level Meeting of the UN General Assembly on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, adopted on 19 September 2011, reaffirming the political will to effectively implement the commitments contained therein and referring to the outcome document of the high-level meeting of the UN General Assembly on the comprehensive review and assessment of the progress achieved in the prevention and control of non-communicable diseases;

**Recognizing** United Nation General Assembly resolution 66/288 on “The future we want”, which recognized health as a precondition for and an outcome and indicator of all three dimensions of sustainable development;

**Considering** the Rio Political Declaration on Social Determinants of Health endorsed by the Sixty-fifth World Health Assembly in resolution WHA65.8 in May 2012;

**Emphasizing** on United Nations General Assembly resolution 72/138 proclaiming 12 December as International Universal Health Coverage Day and calling upon APA Member Parliaments to benefit from this day to raise awareness and promote Universal Health Coverage in their policies;

**Also welcoming** the United Nations General Assembly high-level meeting on universal health coverage held on 23 September 2019 under the theme “Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier World” aimed at accelerating progress towards universal health coverage;

**Recognizing** that equitable access to medicines is one of the fundamental elements in achieving progressively the full realization of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health;

**Recalling** the importance of placing equity and people centric policies in the core of health agenda and noting central role of enabling Universal Health Coverage to provide equitable access to quality health services without financial hardship and access to quality affordable medicine and medical technologies;

**Also recognizing** that health inequities arise from social determinants of health, that is, the societal conditions in which people are born, grow, live, work and age and gender that these determinants include experiences in their early years, education, economic status, employment and decent work, housing and environment, and effective systems of preventing and treating ill health and also from the difference in levels of development of countries and their respective capacities;

**Emphasizing** the need to comprehensively combat social and health related problems emanating from illegal drugs, psychotropic, alcohol and tobacco products, and promote policies to prevent and control their use, abuse and addiction;

**Expressing** concern about the existing socio-economic inequalities and their impact on the poor and vulnerable population, as well as the remote geographical areas and underserved urban areas;

**Also expressing** concern on deteriorating health effects of wars and armed conflicts by hindering provision and quality of health service and causing deprivation from fundamental human rights prospective to health, due to the inequalities in access and utilization of qualified health services including interactions with Special UN mandates;

**Noting** that the Covid-19 pandemic has revealed serious shortcomings in preparedness for, timely and effective prevention and detection of, as well as response to and recovery from public health emergencies, including in the capacity and resilience of health systems, indicating the need to better prepare for future health emergencies;

**Acknowledging** the importance of developing, strengthening and maintaining the capacities to detect, access, notify and report events and the importance of timely notification of events that may constitute a public health emergency of international concern in accordance with relevant provisions of the International Health Regulations (2005), and acknowledging the critical role played by international cooperation and timely and transparent sharing of epidemiological and clinical data, biological samples, knowledge and information, including timely sharing of pathogen genetic sequence data alongside sharing the benefits arising from utilization of such resources, and in this context recalling the Convention on Biological Diversity and its objectives and principle and the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity;

**Emphasizing** the need to promote initiatives aimed at ensuring timely, affordable and equitable access to, as well as the distribution of diagnostics, therapeutics, medicines and vaccines, and essential health products and technologies, and their components, as well as equipment to combat COVID-19 pandemic along with the knowledge sharing and to support the achievement of universal health coverage including preventive measures and actions;

**Stressing** the view that global net-working provides opportunities for Member Parliaments to engage in fruitful dialogue and exchange of best practices on health equity;

**Reaffirming** the significant role of parliaments both in advocating and promoting national policies and legislative measures for achieving health equity;

**Emphasizing** that the equitable distribution of any pandemic including Covid-19 vaccines and medical countermeasures for future health emergencies, based on humanitarian and ethical standards, has brought global benefits necessary to save lives, and that keeping the vaccine for a limited number of countries will lead to the prolongation of the pandemic, the continuation of its moral, health and economic repercussions on all the world countries, and will lead to the failure of efforts to eradicate this pandemic;

**Having in mind** that access to basic health services and medicine is a universally accepted norm arising from fundamental elements of human rights;

**Bearing in mind** that the Covid-19 pandemic was a global challenge and even after declaration of the pandemic to be over by the World Health Organization, remains a public health problem, which affects the welfare of the humanity and disproportionately impacts on the most vulnerable people and regions across the globe;

**Taking into consideration** that the states are facing problems and challenges regarding the protection from, diagnosing and treatment of the Covid-19, and that the health system and hospitals in many countries are under pressure;

**Recognizing** that the global challenges caused by the Covid-19 pandemic can only be overcome by international solidarity and cooperation, particularly in the fields of anti-Covid-19 vaccine procurement allocation, distribution and inoculation as well as enhancement the worldwide production capacity of the vaccine;

*We therefore,*

1. **Urge** the APA Member Parliaments to incorporate Social Determinants of Health (SDH) more intensively in other APA themes and activities;
2. **Urge** the APA Member Parliaments to strengthen collaboration with a view to formulating a coherent approach with regard to social determinants of health in Asia, especially education, housing, and employment;
3. **Invite** the APA Member Parliaments to promote health equity in Asia through sharing experiences and best practices on identifying vulnerability and inequity and actively advocate the inclusion of social determinants of health in national policies and programs in accordance with national contexts and priorities;
4. **Invite** APA member Parliaments to develop a cross-sectoral collaboration for the advancement of health equity in Asia through comprehensive training and study exchanges on social determination of health among policy makers and related stake- holders;
5. **Urge** the APA Member Parliaments to adopt policies and measures to improve service provision, primary health care, human resources for health and health financing system including social protection system as well as health insurance plans for a more equitable resource distribution;
6. **Provide** adequate, predictable, evidence-based and sustainable finances, while improving their effectiveness, to support national efforts in achieving universal health coverage, in accordance with national contexts and priorities, through domestic, bilateral, regional and multilateral channels, including international cooperation, financial and technical assistance, considering the use of traditional and innovative financing mechanisms;
7. **Call on** APA Member Parliaments to encourage their respective governments in order to establish networking among major governmental and non-governmental institutions dealing with health issues in Asia, and expand cooperation with academic institutions, non-governmental organizations, civil society groups, academia and the media with adequate safeguard in order to identify the main social determinants of health;
8. **Call upon** APA Member Parliaments to take action in their countries to increase health literacy and awareness as well as to enhance health promotion and disease prevention;
9. **Call upon** APA Member Parliaments to persuade their respective governments to create and implement targeted policies, activities, and programs in line with national contexts and priorities to ensure a success in the achievement of SDGs including universal health coverage with regard to health policies; and promoting access to quality, efficacious, safe and affordable diagnosis, therapeutics, medicines, and vaccines, and essential technologies, and their components, as well as equipment as appropriate;

10. **Call upon** APA Member Parliaments to undertake measures to coordinate responses to epidemics and to support international efforts to prevent, mitigate and address the impacts of infectious diseases and epidemics in accordance with the goal of advancing the 2030 Agenda;
11. **Also Call upon** APA to encourage their respective governments to cooperate and coordinate for successful negotiations of a Pandemic Treaty under the aegis of WHO, that is balance, operationalizes global health equity and strengthens capacity of all Asian countries for pandemic prevention, preparedness, response and recovery;
12. **Invite** APA Member Parliaments to encourage their respective governments for enhancing the role of digital technologies, connectivity and access in public health, medical care and health services;
13. **Call on** APA Member Parliaments to take necessary actions and to encourage their respective governments to ensure child nutrition needs and to tackle malnutrition with a focus on equity for a healthier generation;
14. **Determine** to accelerate the achievement of SDG 2030 health targets and to take active part on the discussion of 2030 development agenda by delivering Asian views in the international arena to drive the global agenda forward, as appropriate in the national context and priorities;
15. **Calls upon** APA Member Parliaments to take action in their countries and persuade governments and other stakeholders for timely and transparent sharing of epidemiological and clinical data, biological samples, knowledge and information, including timely sharing of pathogen genetic sequence data alongside sharing the benefits arising from utilization of such resources, avoid using this data in matters beyond the controls of scientific research and medical treatment and emphasize respect for the privacy of the human personality when conducting research on human genes and in this context recalling the Convention on Biological Diversity and its objectives and principle and the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity and its objective;
16. **Calls upon** APA Member Parliaments to support the ongoing consideration in WTO on a Covid-19 vaccine Intellectual Property Rights waiver and the use of flexibilities of the TRIPS agreement and the Doha Declaration on TRIPS Agreement and Public Health;
17. **Encourage** the APA Member Parliaments to actively participate in the process of arriving at common objectives which could form the basis of national legislations promoting health equity in Asia, with due attention to equitable social protection policies for health care, long term disability, and protection during unemployment and old age, as appropriate in the national context and priorities;



18. **Support** the free and full access of all nations, especially the Asian nations, to all health capabilities and facilities in the event of a pandemic, including Covid-19, as a human right. In this regard, express grave concern over restrictive and punitive measures illegally imposed on our nations at bilateral and multilateral levels, with negative impact on the right of health, right of free and full access to health and medicine in time of current pandemics;
19. **Call upon** the international community to continue support and assist developing countries in Asia and avoid all politically motivated measures aimed at hampering their access in this regard;
20. **Urge** the APA Member Parliaments to adopt relevant legislations to support universal access of all population in Asia to basic health services and pharmaceutical products;
21. **Demand** Israel<sup>4</sup> - the occupying power - to fulfill its obligations under the Fourth Geneva Convention to provide the Palestinians in the occupied territories since 1967 with anti-Coronavirus vaccines, because the ultimate responsibility for providing them with full health services is the Israeli occupation responsibility until the occupation is completely finished, and asking the Israeli occupation to ensure the freedom of mobilization of patients from Gaza Strip, which has been besieged for 14 years, and evacuate the patients for treatment outside Gaza Strip, while emphasizing the free access of all medical and health supplies;
22. **Request** APA Member Parliaments to inform the Secretary-General on the progress made on the implementation of this resolution in their respective countries in order to share them with all Member Parliaments;
23. **Call on** APA Member Parliament to reconsider the health legislation in force to ensure achieving the goal of universal health coverage for all, in addition to increase public allocations for health spending in the countries of the continent to internationally recognized rates, in a manner that enhances equal access to adequate and sustainable health services for all citizens of the continent, especially women, children and the poorest groups;
24. **Confirm** that the Members of the Asian Parliamentary Assembly have the will to promote solidarity and cooperation in the fight against Covid-19 pandemic;
25. **Call for** the nations to take further steps especially regarding equitable access to the anti-Covid-19 and other pandemic vaccines and more effective international solidarity on sharing the existing anti-Covid-19 vaccines with the most vulnerable population and notes with appreciation in this regard the UN Human Rights Council's and the General Assembly's resolutions on ensuring equitable, affordable, timely and universal access for all countries to vaccines in response to the coronavirus disease including (COVID-19) pandemic;
26. **Exhort** the nations to share the information, experiences and data concerning the Covid-19 pandemic and measures taken as well as the developments on diagnostics, treatments and prevention, including the anti-Covid-19 vaccines;

<sup>4</sup> Iran registered its reservation on word " Israel".

27. **Invite** the nations to look into possibilities to participate in vaccine development studies carried out in the Member Countries of the Asian Parliamentary Assembly.
28. We emphasize that health problems are not only caused by local factors, but are also related to the work of other communities and the health of other people near and far, therefore, ensuring that everyone in every country has access to health care can indeed better protect everyone's health.



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/04

22 September 2023

Azerbaijan

## Draft Resolution on Asian Parliamentarians Against Corruption

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Recalling** APA Resolutions on Combating Corruption contained in APA/Res/2013/09, December 2013; APA/Res/2010/01; APA/Res/2009/03; APA/Res/2008/18; as well as the APA Plan of Action on Combating Corruption contained in APA/Res/2007/05/Annex;

**Welcoming** the adoption of resolution 8/14 – Promoting good practices in relation to the role of National Parliaments and other Legislative Bodies in preventing and combating corruption in all its forms – by the 8th Conference of States Parties to the UN Convention against Corruption held from 16 – 20 December 2019 in Abu Dhabi, UAE;

**Taking note** of the importance of the United Nations Convention against Corruption adopted by the General Assembly on October 31, 2003, other anti-corruption conventions and relevant binding legal instruments;

**Recognizing** that fighting corruption at all levels and in all its forms is a priority and that corruption is a serious barrier to effective resource mobilization and allocation and diverts resources away from activities that are vital for poverty eradication and sustainable development;

**Bearing in mind** that corruption is a transnational phenomenon and that prevention and eradication of corruption is the responsibility of all States and that they must cooperate with one another;

**Emphasizing** that corruption hinders the development process as well as building a state of law and institutions, and stands in the way of prosperity, as well as undermining the building of democracy, whereas the prevention thereof has become an urgent necessity and a comprehensive public interest.

**Reaffirming** the importance of respect for human rights, the rule of law, good governance, and democracy in the fight against corruption;

**Recognizing** the important role of parliaments to promote transparency, participation, accountability and integrity as some of the principles of anti-corruption strategy;

**Acknowledging** that the fight against all forms of corruption requires comprehensive and multidisciplinary approach including anti-corruption frameworks and strong institutions at all levels;

*Expressing* concern about the laundering and transfer of stolen assets and proceeds of corruption, and stressing the need to address this concern in accordance with the United Nations Convention against Corruption;

*We therefore,*

1. **Condemn** corruption at all levels and in all its forms, including bribery; money laundering; and abuse of power;
2. **Express** determination to prevent and combat corrupt practices in all forms and collaborate on facilitating asset recovery and returning such assets to their legitimate owners, in particular to countries of origin, in accordance with the United Nations Convention against Corruption;
3. **Welcome** the significant number of Member States that have already ratified or acceded to the United Nations Convention against Corruption, and in this regard urges all APA Member Parliaments that have not yet done so to consider ratifying or acceding to the United Nations Convention against Corruption as a matter of priority, and urges all States Parties to the Convention to take appropriate measures ensuring its full and effective implementation;
4. **Resolve** to promote exchange of good practices and experiences regarding the role of Parliaments in preventing and countering corruption, including by raising awareness among public, reviewing and strengthening anti-corruption legislation, exercising parliamentary oversight, fostering a culture of transparency and accountability, promoting rule of law and strengthening institutions at national level;
5. **Recognize** the importance of strengthening Parliaments, role in combating corruption and promoting the exchange of good practices and national experience among Parliamentary Institutions as called for by the Resolution 8/14 adopted by the 8th Conference of States Parties to the UN Convention Against Corruption held from 16 – 20 December 2019 in Abu Dhabi, UAE;
6. **Invite** the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption to consider holding thematic discussion on strengthening the role of national parliaments in fighting corruption, including promoting the implementation of this Convention;
7. **Decide** to set up a working group under the auspices of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs to further consider the APA Plan of Action on Combating Corruption contained in APA/Res/2007/05/ Annex with a view to taking effective measures for enhancing synergy and interactions among Asian Parliamentarians in fighting corruption;

8. **Consider** to improve and expand working relations with important Asian organizations such as GOPAC ( Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) Chapter in order to enhance synergy and areas for cooperation and joint initiatives;
9. **Urge** States Parties to United Nations Convention against Corruption that have not already done so to designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution;
10. **Request** the Secretary-General to prepare in consultation with interested APA Delegations, particularly APA delegates with interest and experience in anti-corruption efforts, the required draft documents for consideration by the working group set up in this respect;
11. **Call on** member parliaments to empower civil society as an effective partner of parliaments and promote the role of the media in combating corruption in Asia;
12. **Also call on** member parliaments to encourage their governments to allocate a budget to support the work of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) to promote the role of supreme audit institutions in preventing and combating corruption more effectively and strengthening cooperation between supervisory and anti-corruption bodies;
13. **Invite** member parliaments to encourage their governments to engage the private sector in developing criteria and procedures to protect against corruption;
14. **Urge** member parliaments to encourage their governments to provide and harness the full potential of employing education and technology in preventing and combating corruption to reduce the likelihood of the spread of corruption;
15. **Also invite** member parliaments to encourage their governments to implement strategies and policies aimed at combating corruption and to develop measures to combat impunity;
16. **Request** the APA Secretary-General to seek the views of Member Parliaments on implementation of this resolution.



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/05  
22 September 2023  
Azerbaijan

## Draft Resolution on APA Women Parliamentarians

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Recalling** the APA Plenary Resolution (APA/Res/2010/06, 30 November, 2010) on the establishment of the Coordinating Meeting of APA Women Parliamentarians and the APA Resolution on Special Committee of APA Women Parliamentarians (APA/Res/2014/16) superseding the Coordinating Meeting of APA Women Parliamentarians, as well as other relevant resolutions;

**Being mindful** of the fact that despite all efforts made for the promotion of women's rights, gender inequality and injustice contrary to human dignity still persists between women and men both in the extent of power at decision-making and in mechanisms to promote the advancement of women;

**Being aware** of the importance of promoting the full and effective participation of women in scientific, social, political, cultural and economic affairs, and peace dialogue particularly in upcoming issues, including COVID- 19 pandemic response and recovery;

**Reaffirming** that inclusion of women in positions of power and elected bodies, and also their involvement in the decision making process, strengthens the development of democratic principles in public life and increases the sustainable development;

**Noting** that women face obstacles in entering Parliaments includes political, socio-economic and cultural environment;

**Acknowledging** the necessity to place on the agenda of APA meetings matters of importance in this regard such as eliminating violence against women, empowerment of women and their participation in political and economic life, and prevention of all kinds of harassments, sexual violence against women and girls, trafficking, and other types of exploitation including in situation of armed conflict particularly amid the humanitarian situations and emergencies;

**Considering** women's issues, including gender stereotype women's empowerment, eliminating violence and discrimination which prevent them to enjoy access to health services, education, equal opportunity, and fair pay; and seek to engage women in political, economic and social aspects of life;

**Stressing** our resolve to participate and contribute actively in the deliberation of issues relating to women's empowerment and participation in APA meetings;

**Noting** that CEDAW (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against

Women) as well as the decisions of the Fourth World Conference on Women Beijing 1995, and its subsequent periodic follow-up conferences, being held every five years from Beijing +1 to Beijing + 5, have all developed a comprehensive framework for the protection and empowerment of women and girls, eliminating all forms of discrimination against them and ensuring that they obtain their legitimate rights for it states parties;

**Underlining** the need to facilitate networking between women parliamentarians of Asia to meet the challenges in women's issues, including in humanitarian situation, amid the Covid-19 pandemic and in combating the negative impact of unilateral coercive measures;

**We express** our deep concern about the negative and unfortunate consequences of the outbreak of the Covid-19 pandemic that have affected women in general, and the breadwinners in particular; and call on states and governments to take this matter into consideration, and they embark on the process of developing pandemic response and recovery policies;

*We therefore,*

1. **Encourage** APA Member Parliaments to ensure the full and effective inclusion of women in social, cultural, economic, political, and sustainable development affairs in Asia, at national, regional, and international levels as appropriate;
2. **Encourage** APA Member Parliaments to adopt legislations to facilitate women's representations in Asian Parliaments;
3. **Encourage** APA Women Parliamentarians to lead by example and place the interest of women at the heart of policy and decision making as an endeavor to encourage and engage more women into politics;
4. **Recommend** the importance of information and awareness campaigns to promote the integration of women into political participation and decision – making with a view to facilitate reaching national and international parliamentary institutions;
5. **Encourage** APA Member Parliaments to recognize the concerns of and discrimination and inequalities experienced by women, and to effectively implement the relevant provisions of United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development which promote gender equality and empowerment of women with respect for national and cultural particularities of the Member States, in line with international law, as applicable;
6. **Encourage** APA Member Parliaments to recognize that gender equality and empowerment of women as a stand-alone goal with clear targets and indicators that must be achieved through implementation of goal 5 of the Sustainable Development Goals (SDGs) with respect to national and cultural particularities of the Member States, in line with international law, as applicable;

**Emphasizing** the concept of family values as a basic unit to build a healthy and viable society,

7. **Determine** to enhance the activities of the Coordinating Meeting of APA Women Parliamentarian through more effective exchange of views and close interaction;
8. **Request** the Special Committee of APA Women Parliamentarians to expand the scope of its activities under the auspices of Standing Committee on Social and Cultural Affairs and to take appropriate measures to facilitate networking among women parliamentarians in Asia;
9. **Request** the APA Secretariat to assign one special part of the website of the Assembly to facilitate networking among women parliamentarians of Asia covering updated information on the activities of the APA Women Parliamentarians;

**Express** grave concern at the dire situation of millions of women in all war-torn and conflict-ridden areas who are inevitably in danger of and impacted by mortality and morbidity of themselves and their family members particularly their children;

10. **Express** support of APA Member Parliaments in advancing women, peace and security agenda, particularly by enhancing women's role peacebuilding activities.





Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/06

22 September 2023

Azerbaijan

## Draft Resolution on Promoting Dialogue and Harmony among Followers of World Religions

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Noting** the role of the United Nations Alliance of Civilizations in fostering the values of compassion, inclusion, and respect in working towards a more just peaceful, inclusive world, by promoting greater understanding, tolerance and respect among civilizations, cultures, religions and beliefs;

**Recalling** with appreciation various global, regional and sub-regional initiatives on mutual understanding and interfaith harmony including the United Nations General Assembly Resolution 65/5 (2010), the International Conference on Environment, Peace and the Dialogue among Civilizations and Cultures (2005), the Asia- Europe Meeting Interfaith Dialogue on the theme “Building Interfaith Harmony within the International Community” (2005), the High Level Conference on International and Inter-Religious Dialogue (2014), and the seventh global Forum of the United Nations Alliance of Civilizations, (2016), the VI Congress of the Leaders of World and Traditional Religions,(2018), the “Human Fraternity Document for World Peace and Living Together” issued by Human Fraternity Meeting, (2019);

**Being mindful** of the fact that, Inter-Faith harmony among followers of different religions of the world in general and Asia, in particular, is of utmost importance for the survival and harmony of mankind and the promotion of the culture of peace, understanding, respect, security and tolerance;

**Recognizing** the essential role of dialogue among followers of different faiths and religions in enhancing mutual collaboration, harmony and cooperation among their followers;

**Expressing** the need to explore ways and means to intensify Inter-Faith Harmony and resultant cooperation to strengthen the international peace and security to make the world a better place to live;

**Acknowledging** that the moral imperatives of all religions, convictions and beliefs call for peace, tolerance and mutual understanding;

**Commending** the initiatives taken by the United Nations in support of dialogue among civilizations and citizens and followers of religions, foremost among which is the United Nations Alliance of Civilizations UNAOC;

*Also welcoming* the initiatives of some countries who promote dialogue among people of different religions, including the Center for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICID), which was established in 2012, and the Global Center for Peaceful Coexistence that was established in 2018 and the inauguration of the Chair for Interfaith Dialogue and Peaceful Coexistence at Sapienza University in Rome in 2018;

*We therefore,*

1. **Decide** to apply for Asian Parliamentary Assembly's membership to the Group of Friends of the UN Alliance of Civilizations as proposed by Turkiye during the 11<sup>th</sup> General Assembly with a view to contribute the efforts of providing lasting solutions to the rising trends of discrimination, xenophobia, intolerance and extremism;
2. **Maintain** that a regular dialogue between the APA Member Parliaments become an effective supplement for addressing the challenges of ongoing international conflicts based on religious differences and discrepancies;
3. **Denounce** the hatred stereotyping of persons based on their ethnicity and religion condemning any activity that leads towards the division between the followers of different faiths;
4. **Underline** the importance of moderation in as a value within societies for countering violent extremism and for further contributing to the promotion of inter-faith and inter-cultural dialogue, tolerance, understanding and cooperation and Encourage efforts, as appropriate, to enable voice of moderation to work together in order to build a more secure, inclusive and peaceful world;
5. **Declare** that extremism and terrorism can not be attributed or accredited to any religion or nationality as these are common enemies of all humanity;
6. **Consider** that any form of discrimination based on religion, belief, faith or ethnic adherence is contrary to the merits of inter-faith dialogue and has no place in the community of civilized nations;
7. **Encourage** APA Member Parliaments to consider providing a respective national legal instrument, with the aim of creating a conducive atmosphere for inter-faith dialogue and cooperation as well as harmony among all religions;
8. **Deplore**, in the strongest terms, all atrocities and acts of violence, committed by extremist and terrorist groups under the guise of religions and call upon all states to refrain from providing any support to such terrorist groups;
9. **Condemn** the misuse and distortion of religious beliefs, by extremist groups and their followers, which inflame intra-faith as well as inter-faith hatred and hold them accountable for instigation of ill-judgment, violence, and brutality against people of other religions and faiths;

**Condemn** the shameful acts and the exploitation of freedom of opinion and expression to offend religious beliefs and divine books, which constitutes a serious offense to the feelings of hundreds of millions of Muslims around the world;

10. **Strongly condemn** any advocacy of hatred based on religion or belief which constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, whether it involves the use of print, audiovisual or electronic media or any other means;
11. **Call upon** the international community to be cognizant of humanitarian situations in Asia;
12. **Urge** all APA Member Parliaments to intensify their efforts for the development of international and regional frameworks to promote best practices which leads towards the inter faith harmony and collaboration;
13. **Invite** Member Parliaments to further promote reconciliation to help to ensure durable peace and sustained development, including by working with faith leaders and communities and through reconciliatory measures and acts of service and by encouraging forgiveness and compassion among individuals;
14. **Encourage** all member parliaments to pass laws and legislation to criminalize acts associated with defamation of religions and their sanctities, combat all forms of discrimination, and firmly renounce hate speech and Islamophobia;
15. **Emphasize** the importance of the concerted efforts of the international community in establishing specialized centers to combat extremist ideology and terrorism, in order to promote a culture of peace, security, and tolerance;
16. **Encourage** Asian countries to adhere to the principles and values set out in the Human Fraternity Document for World Peace and Living Together, reflecting the values of tolerance, moderation, and the rejection of racism;
17. **Encourage** Asian countries to develop a tolerance award to support the efforts in the fields of peace and tolerance;
18. **Request** the APA Secretary-General to seek the views as well as measures taken by APA Member Parliaments to implement this resolution and to report thereon to the next meeting of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs.



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/07

22 September 2023

Azerbaijan

## Draft Resolution on Legal and Legislative Cooperation in Combating the Smuggling of Cultural Items in Asia

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Recalling** APA/Resolution/2013/05 of 9 December 2013 on Protecting and Respecting Cultural Diversity in Asia;

**Recalling** the relevant provisions where applicable on the protection of cultural heritage including the four Geneva Conventions (1949), the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954) and its related protocols, the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970), the *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (1972), UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (2001), the New Delhi UNESCO Recommendation of 1956 concerning excavations undertaken in occupied territories, the inscription of the Old City of Jerusalem and its Walls at the request of Jordan on the World Heritage List (1981) and on the List of World Heritage in Danger (1982) and related recommendations, resolutions and decisions of UNESCO, (UNESCO, the World Heritage Committee, Decision: 42 COM 7A.21, Old City of Jerusalem and its Walls (site proposed by Jordan, C 148 rev);

**Underlining** the obligation for all States Parties to urgently implement the provisions in paragraphs 15 to 17 of the United Nations Security Council Resolution 2199 (2015), in reference to the cultural heritage at risk in Iraq and Syria;

**Taking into account** the United Nations Security Council Resolution 2347 (2017) which aims at mainstreaming the protection of cultural heritage at the global level;

**Recalling** the United Nations General Assembly resolution 66/180 of 19 December 2011 on “Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Protect Cultural Property, especially with regard to its Trafficking”, in which the Assembly urged Member States and relevant institutions, as appropriate, to reinforce and fully implement mechanisms to strengthen international cooperation, including mutual legal assistance, in order to combat all forms and aspects of trafficking in cultural property and related offences, such as the theft, looting, damage, removal, pillage and destruction of cultural property, and to facilitate the recovery and return of stolen and looted cultural property, and recalling also General Assembly resolutions 68/186 of 18 December 2013 on strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking 69/196 of 18 December 2014, entitled “International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to

Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences”, and 70/76 of 9 December 2015 on return or restitution of cultural property to the countries of origin;

**Welcoming** the important and active role that the UN and its relevant agencies play in countering money laundering and terrorist financing linked to trade in smuggled artifacts, in particular, in Asia;

**Expressing** deep concern about the growing problem of smuggling of cultural items in Asia;

**Affirming** the important role of parliaments prevailing upon the governments to develop a national strategy including a legal framework to combat smuggling of cultural items;

**Considering** the smuggling of cultural property from Asia a threat to the richness of Asian cultural heritage;

**Recognizing** the role of parliaments to enhance public awareness about the threat to national identity and heritage of states from which cultural items are smuggled abroad;

**Recognizing** also the need to enhance national capacities, including parliamentary capacity to reinforce national strategy to combat smuggling of cultural items; *We therefore,*

- 1. Urge** all APA Member Parliaments to utilize their legislative role to prevent and punish the smuggling of cultural objects in Asia and facilitate concerted efforts to return the stolen items back to their original locations without any cost to the original owner country;
- 2. Call on** all APA member parliaments that have not yet done so to consider ratifying the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954), UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970), UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972), UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (2001) and the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003);
- 3. Request** all APA Member Parliaments to strengthen their national legislation on protecting cultural properties and combatting all forms of smuggling in cultural property and related offences to be enacted on the basis of the common principles prepared by APA Secretariat and annexed to this resolution, and in accordance with their own internal legislative procedures;
- 4. Express** support for the further strengthening of the system of management to protect movable cultural heritage from theft and smuggling of cultural properties;

5. **Urge** APA member parliament and national government to work more closely in the development of legislations and implementation of laws aiming at the combat of cross-border illicit trade and smuggling of cultural artifacts and other cultural assets, while also ensuring mutual support and assistance by law-enforcement bodies in the combat operations;
6. **Also Urge** all Member Parliaments to exercise efforts to jointly register their shared tangible and intangible cultural heritages at UNESCO's relevant list.



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/08

22 September 2023

Azerbaijan

## Draft Resolution on Effective Cooperation in Combating Illicit Drug Trafficking in Asia

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Recalling** the report of the Standing Committee meeting on Social and Cultural Affairs held in Tehran, Islamic Republic of Iran, on 13-14 September 2011;

**Mindful** of the fact that illicit drug trafficking and its negative impact on health, safety, public order, governance, economic development and social health constitutes a prime concern in Asia and deserves a comprehensive consideration by the APA;

**Stressing** the need to continue to take concentrated measures within the framework of the Paris Pact in order to strengthen cross-border cooperation and information exchanged with a view to countering illicit cultivation of narcotic crops, production and trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursor chemical substances in Asia;

**Emphasizing** that the danger of illicit drug trafficking is pervasive so there is an urgent need to mobilize efforts of all countries to curb the production of opium and heroin in the Asian continent and to dismantle networks of illicit drug trafficking from all over Asia;

**Acknowledging** that the States most affected by the transit of drugs, especially the developing countries among them, have made important contributions to and sacrifices in countering illicit drug trafficking and preventing illicitly trafficked substances from region and markets;

**Emphasizing** afresh the continuing need to provide concrete, sufficient and sustainable technical and capacity-building support to the States most affected by the transit of drugs, especially the developing countries among them, in their efforts to curb illicit drug trafficking and deal with associated challenges;

**Recognizing** that production and illicit trafficking of narcotics drugs, psychotropic substances and their precursor chemicals can be utilized for financing of other organized crimes, including terrorism;

**Expressing** the need to explore ways and means to intensify regional coordination among legislators to combat drug trafficking and make anti-drug policies a priority in programs of co-operation with, and of assistance to, the Asian countries which are affected by illicit drug trafficking;

**Recognizing** the interconnected challenges facing Asian countries, including continued illegal cultivation, production and trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursor chemicals that pose a serious threat to the region;

**Expressing** the need to increase international and regional support for the capacity building of law-enforcement agencies in the areas most affected by the illicit cultivation of narcotic crops, production and trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursor chemicals in Asia, and to intensify training programs for their law-enforcement staff;

**Further recognizing** the importance of “Alternative Development” program as an approach to reducing the cultivation of plants containing drug substances through rural development measures that has been strongly endorsed by UN Commission on Narcotic Drug;

**Stressing** the need to enhance joint co-operation with the relevant law-enforcement agencies of APA Member Parliaments focusing on clandestine heroin-producing laboratories and organized criminal groups involved in the illicit drugs trade, emphasizing the urgent need to increase efforts by the relevant UN Stakeholders aimed at integrated rural development, building infrastructure and supporting farmers engaged in alternative production;

**Recognizing** the need for more cooperation and intelligence sharing with a result-oriented approach between the law enforcement agencies of the Member States in and including customs and border authorities in order to better tackle smuggling of narcotics and psychotropic substances and their precursor chemicals within the region and beyond;

**Supporting** regional and international efforts to improve law enforcement in combating the production and trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursor chemicals and curtailing drug related financial activities;

**Emphasizing** the need to assist countries most affected by or at risk of the illicit cultivation of narcotic crops in developing its economy and diversifying agriculture so as to reduce people’s dependence on revenues from the illicit cultivation of narcotic crops and trafficking, of narcotic drugs, taking into account the United Nations Guiding Principles on Alternative Development and in line with national legislation;

**Reaffirming** that Alternative Development is crucial, lawful, viable and sustainable alternative to the illicit cultivation of narcotic crops, that it is an effective measure and one of the key components of policies and programs to counter illicit drug production and other drug-related crime challenges, and stressing that the implementation of the United Nations Guiding Principles on Alternative Development will contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals contained in the 2030 Agenda for Sustainable Development;

**Stressing** the need to share best practices and take adequate measures in preventing, treatment and rehabilitation of drug addicts;

**Expressing** the need for more active and efficient international cooperation in combating illicit drug trafficking in Asia;



*Attaching great importance to* the efforts made by international and regional organizations including the United Nations (UN), office of drugs and crimes (UNODC) and the Asian Parliamentary Assembly (APA) to combat the threats of terrorism, illicit drug trafficking, transnational organized crime and legalization of income derived from criminal activity;

**‘Underscoring** that the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol, the Convention on Psychotropic Substances of 1971, the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, and other relevant international instruments constitute the cornerstone of the international drug control system;

**‘Reaffirming** our unwavering commitment, including in the context addressing Narcotics Drugs, to ensure that all aspects of demand reduction and related measures, supply reduction and related measures, and international cooperation should be addressed in full conformity with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, International Law, and the Universal Declaration of Human Rights, with full respect for the sovereignty and territorial integrity of States, the principle of nonintervention in the internal affairs of States, all human rights, fundamental freedoms, the inherent dignity of all individuals and the principles of equal rights and mutual respect among states;

*We therefore,*

1. **Call upon** Asian Parliaments to coordinate among themselves to review relevant legislation to address different aspects of combating illicit drug trafficking by harmonizing laws and making minimum punishment stronger;
2. **Call upon** Asian Parliaments to adopt laws on extradition of convicted persons on terrorism and illicit drug trafficking to their countries of origin for fair trial based on national legislations;
3. **Stress** the need to exchange information and best practices within APA Member Parliaments on combating illicit drug trafficking;
4. **Remain vigilant** to the new modus operandi through the digital world and also the availability of the new substances of drug which are not yet listed in the respective national illicit drug lists and call for strong cooperation between APA Member Countries on these issues;
5. **Reiterate** the need to coordinate and improve law enforcement activities to combat the production and trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursor chemicals and curtailing the flow of illicit drug more effectively;

6. **Encourage** the APA Member Parliaments to consider adopting relevant legislation regulations to strengthen international cooperation to support comprehensive and sustainable alternative development programs, as an essential elements of successful crop control strategies, especially in areas affected by or at risk of the illicit cultivation of crops, taking into account the United Nations Guiding Principles on Alternative Development and Member Parliaments with extensive relevant expertise to continue to share best practices, upon request;
7. **Underline** the importance of effectively using international financial assistance for the creation of alternative economic opportunities in order to ensure a sustainable anti-drug policy;
8. **Call upon** APA Asian Parliaments to enable civil society as an effective partner of parliaments and to enhance the role of mass media in combating drug trafficking in Asia;
9. **Encourage** all APA Member Parliaments to support their respective governments in order to coordinate with international and regional organizations including the United Nations (UN) to combat the threats of terrorism, illicit drug trafficking, transnational organized crime and legalization of income derived from criminal activities;
10. **Urge** that a regular dialogue on supporting joint actions of Asian governments against abovementioned threats within APA could become an effective supplement for addressing the challenges of international illicit drug trafficking and transnational organized crime in the region;
11. **Express** our commitment to encourage and enhance cooperation with all relevant states and international and regional organizations, on matters of common interest in the spirit of this resolution on rendering assistance to combat illicit drug trafficking;
12. **Encourage** networking of the relevant national agencies or organizations in Asia dealing with transnational crimes to further enhance information dissemination and intelligence exchange;
13. **Request** the APA Secretary General to seek the views of all Member Parliaments on ways and means for effective implementation of this resolution.



Asian  
Parliamentary  
Assembly

(Deferred)  
APA 13<sup>th</sup> Plenary/SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/09  
9 January 2023  
Turkiye

## Draft Resolution on Humanitarian Aid to Syria, Iraq, Yemen, Gaza and Myanmar on the Verge of the Humanitarian Catastrophe

**(The Standing Committee recommends that this draft resolution be removed from its Agenda)**

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

Welcoming the efforts by the United Nations and the international community aimed at achieving a political solution to the Syrian crisis on the basis of UN Security Council Resolution No. 2254 (2015). (Turkiye)

~~Welcoming~~ the establishment of ceasefire regime in SAR ON 30 December 2016 and the Memorandum on the de-escalating zones in the SAR, signed in Astana, Republic of Kazakhstan, on 4 May 2017; (Turkiye)

Appreciating also the efforts by the Astana platform for ensuring the calm on the ground, advancing the political process in accordance with the UNSC Resolution No. 2254 and implementing confidence-building measures. (Turkiye)

Highlighting the Memorandum on Stabilization of the Situation in the Idlib De-escalation Area, signed in Sochi, Russian Federation, on 17 September 2018 and the “Additional Protocol to the Memorandum on the Stabilization of the Situation in the Idlib De-Escalation Area, signed in Moscow, Russian Federation, on 5 March 2020. (Turkiye)

**Recalling** UN Security Council resolutions 2139 and 2165;

**Also recalling** the United Nations Charter (1945), the Universal Declaration of Human Rights (1948), the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1963), the International Covenant on Civil and Political Rights (1966); (Indonesia)

**Appreciating** the renewal of UN Security Council Resolution 2165 on 13 December 2018 and the ability to enable cross border assistance in Syria;

**Being** concerned about the ongoing humanitarian catastrophe in Syria, Iraq, Yemen, Gaza and Myanmar and about deprivations inflicted upon the internally displaced persons and refugees or any other affected in those countries;

~~**Welcoming** the achievements of the Astana format since January 2017, in particular, the progress made in reducing violence across the Syrian Arab Republic and contributing to peace, security and stability in the country; (Turkiye)~~

**Reaffirming** their determination to continue joint efforts aimed at protecting civilians and improving their humanitarian situation via facilitating rapid, safe and unhindered humanitarian access to the nations of Syria, Iraq, Yemen and Myanmar;

**Acknowledging** that the international organizations, including parliamentary ones and NGOs and individual countries shall support delivery of humanitarian aid to civilians trapped in a humanitarian crisis across the globe;

**“Concerned with the devastating effects of the earthquakes of 6 February that took place in Türkiye and Syria, further deteriorating the already dire humanitarian situation especially in northwest Syria;”** (Turkiye)

**Welcoming** all measures taken by APA Members Parliaments’ governments to assist Syrian, Iraqi, Yemeni and Myanmar displaced persons and<sup>5</sup> refugees including, inter alia, through providing them with humanitarian aids, safe border crossing and temporary settlement;

**Welcoming** APA countries who have announced opening their international borders to refugees;

*We therefore,*

- 1. Deliver** humanitarian support to Syrian, Iraqi, Yemeni and Myanmar civilians across conflict lines and border crossings both multilaterally and bilaterally in accordance with UN General Assembly Resolution 46/182;
- 2. Support** efforts of countries that host refugees and provide humanitarian aid and recommend to take every effort to facilitate aid delivery in Iraq, Syria, Yemen, Gaza and Myanmar;
- 3. Encourage** all relevant parties to further allow UN humanitarian agencies and their partners to utilize routes across conflict lines and border crossings in Syria in accordance with UN General Assembly resolution 46/182 and UN Security Council resolutions 2139 and 2165;
- 4. Provide** assistance to Iraqi, Syrian, Yemeni, Gaza and Myanmar internally displaced persons and refugees, deprived of basic needs and desperate in search of shelter;

<sup>5</sup> Delegation of Türkiye expressed reservation on “displaced persons and” in this paragraph.

5. **Stress** that humanitarian aid delivery in Syria, Iraq, Yemen, Gaza and Myanmar should be carried on in accordance with International Law and National Legislations of these States and condemn any attempt to violate those laws;

**Urge** Syria, Iraq, Yemen, and Myanmar authorities to take an urgent and immediate measures to put an end to all acts that are in violation of human rights, international law, and other international covenants and ask APA Member Parliaments to maintain an effective and constructive communication with them; (New Para: Indonesia)

6. **Assist** in creating conditions for the safe and voluntary return as well as their unconditional repatriation of refugees and internally displaced persons (IDPs) to their original places of residence in Syria and Iraq, Myanmar and Yemen;
7. **Encourage** APA Member Parliaments to closely monitor the safe, voluntary and unconditional repatriation of refugees and internally displaced persons (**Turkiye**) in order to ensure the sustainability of the process and the safety of the refugees;

**Call upon** APA Member Parliament to engage with the respective regional organization, civil society organization, and local communities in order to bridge a constructive communication and promote peace and security in Syria, Iraq, Yemen, Gaza, and Myanmar; (New Para: Indonesia)

**“Encourage** all APA members to contribute financially to ongoing international humanitarian relief efforts in Syria, Yemen, Gaza and Myanmar.” (Turkiye)



Asian  
Parliamentary  
Assembly

(Deferred)  
APA 13<sup>th</sup> Plenary/SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/10  
9 January 2023  
Turkiye

## Draft Resolution on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia

**(The Standing Committee recommends that this draft resolution be removed from its Agenda)**

Members of the Asian Parliamentary Assembly representing signatory states who are parties to the relevant international conventions and agreements;

**Acknowledging** that the development of migrant workers and the protection of their rights are in line with the principles of human rights and contribute to the development and promotion of friendly relations among countries;

**Recalling** the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the Rights of the Child and other relevant international instruments to which the States members of the Asian Parliamentary Assembly are parties;

**Noting** that the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, the International Labor Organization (ILO) Convention 97 concerning Migration for Employment, ILO Convention 143 concerning Migrant Workers (Supplementary Provision), established a broad legal framework for the protection of migrant workers if applicable;

**Taking note of** the importance of the 2016 New York Declaration on Refugee and Migrants and ASEAN Consensus on the Protection and the Promotion of the Rights of Migrant Workers<sup>6</sup>;

**Acknowledging** the significance of ILO Conventions concerning the protection of the rights of migrant workers as well as United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocols Thereto ‘Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children’ and ‘Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air in promoting human rights of Asian migrant workers without prejudice to their sex, race, language, religion, nationality, or ethnic origin;

**Noting** the adoption of ILO Convention Concerning Decent Work for Domestic Workers at the 100th International Labor Organization (ILO) Conference in Geneva, 2011 as a global recognition of the rights of domestic workers where many of them are migrants;

<sup>6</sup> Adopted with reservations from Thailand.

**Underlining** the importance of establishing a national legal framework as well as a broad legal framework for the protection of the rights of migrant workers and noting the legal and illegal status of different cases;

**Deeply concerned** with the precarious conditions faced by migrant workers such as violating of their human rights including through harassment and violence, discrimination, low pay and low status jobs, unpaid jobs, and overwork;

**Underlining** the challenges that women migrant workers are facing such as forced confinement, low pay, non-payment, excessive working hours, physically strenuous activities and sexual harassment and abuse, human trafficking and migrant smuggling, and prostitution;

**Recognizing** that unsettled status of immigrants prevents the establishment of conditions for full scale and comprehensive protection of their right by governments of the countries of destination or transit;

**Emphasizing** that adaptation of labor immigrants to local conditions and working activity in destination states as well as integration into recipient society are important factors which contribute to effective exercise of the rights of labor immigrants;

**Acknowledging** the contribution of migrant workers to the society and economy of both receiving and sending states and their input to the development and prosperity of the region;

**Bearing in mind** the importance of friendly relationships and cooperation among governments, parliaments and the peoples of Asia in solving the problems relating to Asian migrant workers; and in particular, providing repatriation assistance services such as coordination with families, airport assistance, domestic transport, temporary shelter, medical and rehabilitation services;

**Recognizing** the significant role of parliaments both in strengthening social and human rights policies, and in harmonizing an Asian approach on protecting the rights of migrant workers in Asia;

**Confirming** that providing adequate measures on the protection and promotion of the rights of migrant workers in Asia is part of a shared responsibility among Asian Countries toward a common vision for security and prosperity, which focused on the improvement of the quality of life of its people;

**Concerned** with the exodus of people who have tried to flee from their homelands in Asia to some European countries, due to lack or deficiency of security, food, health service, accommodation, employment and so forth; many of whom are young migrant workers;

**Noting** with great concern that ethnic and other forms of intolerance are the major causes of forced migration;

*We therefore,*

1. **Encourage** APA Member Parliaments to consider accession to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families to stress Asian commitment on the protection of the rights of migrant workers and humanitarian issues in Asia;
2. **Call upon** APA Member Parliaments to enhance and harmonize their actions towards a better protection of migrant workers' rights, especially the cases of women and children;
3. **Also Call Upon** APA Member Parliaments to urge their respective Government to integrate visions, principles, objectives and commitments enshrined under the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration adopted at the UN Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration held in Morocco, December 2018 into their migrant-related national policies;
4. **Request** APA sending countries to provide migrant workers with adequate skills and knowledge *as well as pre-departure orientation (Thailand)* in order to be able to fulfill their task and understand the culture, prevailing laws and regulation in the receiving countries;
5. **Emphasizing** that Urge the APA Member States should to facilitate vocational training for migrant labor forces ~~so that those migrant workers can integrate~~ *migrant workers in order to integrate them (Thailand)* into the receiving country, ~~ensuring their life and contributing to~~ *thereby enhancing their quality of life and their contribution to the (Thailand)* socio-economic development, stability and security ~~in of (Thailand)~~ *every receiving (Thailand)* country;
6. **Urge** APA Member Parliaments to ensure that, in case of violation of domestic laws, such laws should be applied in a fair and just manner to both migrant workers and citizens;
7. **Encourage** the promotion of bilateral and regional cooperation among countries in all areas and issues of migrant workers to maximize the potential benefits and minimize the negative impacts of migration;
8. **Encourage** the respective States of the APA Member Parliaments to consider bilateral, or regional agreements including Mandatory Consular Notification Agreement under the spirit of Vienna Convention on Consular Relations; whereby the sending countries are well informed on the legal problems faced by their migrant workers;



9. **Emphasize** the importance of involving United Nations system, international organizations, civil society, and non-government organizations, and increasing participation and interaction with all stakeholders to enable government to develop better policies and supervise the implementation of regulations on migrant workers issues;
10. **Recommend** APA Member Parliaments to provide adequate information on regulation, legislation and policies related to migrant workers in their respective countries, and to share information and best practices as well as opportunities and challenges encountered by Asian countries in relation to the protection and promotion of migrant workers' rights and welfare;
11. **Urge** the APA relevant member countries to promote fair and proper working conditions, proper minimum wages, and adequate access to decent living conditions and health for migrant workers;
12. **Request** the Secretary-General to coordinate with APA Member Parliaments on the progress to implement this resolution and submit a report thereon to the meeting of the Standing committee on Social and Cultural Affairs.



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/11  
22 September 2023  
Azerbaijan

## Draft Resolution on the Promotion of Quality Child and Youth Development for Sustainable Society in Asia

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Recalling** UN General Assembly resolution 70/1 of 25 September 2015, during which the General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development and recognized children and youth as critical agents of change;

**Recognizing** the role of parliaments in promoting the human rights and empowerment of children and youth in Asia;

**Stressing** on the commitment of the implementation of the Sustainable Development Goals, in particular Goals 4, 5, 8, 16, based on national rules and cultural backgrounds, in line with international law as applicable, as the basis for building sustainable, peaceful and inclusive societies in Asia;

**Recognizing** that the cooperation between APA Member Parliaments can be instrumental in promoting quality child and youth development in the region;

**Reaffirming** that the general principles of the Convention on the Rights of the Child, including the best interests of the child, non-discrimination, participation and survival and development, provide the international legal framework for actions concerning children to ensure that their rights are protected, based on national rules and cultural background and in line with international law as applicable;

**Reaffirming** the World Program of Action on Youth including the best interests of the youth, non-discrimination, participation, survival and development and provide framework of actions concerning youth; to ensure youth are protected in their rights;

*We therefore,*

1. **Call upon** APA Member Parliaments to recognize the importance of the quality child and youth development and to consider, with participation of children and youth, the provision of comprehensive social welfare, including access to health care, nutrition, quality education, training for skill development and other essential services to empower children and youth as healthy, responsible and productive members of society;-



2. **Encourage** APA Member Parliaments to take appropriate measures to enhance cooperation among Member Parliaments to promote quality child and youth development, care and assistance, as well as to protect all children and youth from all forms of violence, abuse, radicalization, exploitation and discrimination;-
3. **Also encourage** APA Member Parliaments to strengthen and, where necessary, enact or reform legislations to ensure that all children and youth are protected against all forms of violence, as well as to improve child and youth development schemes;
4. **Request** the APA Secretary-General to submit, in collaboration with APA Member Parliaments, a report to the meeting of the Standing Committee on Social and Cultural Affairs Parliaments on the implementation of this resolution.



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/12  
22 September 2023  
Azerbaijan

## Draft Resolution on Ageing Society in Asia

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Recalling** its resolution 2017/12 Resolution on The Role of APA Parliaments in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals and resolution 2017/17 on Collaboration on Health Equity in Asia;

**Recalling** UN General Assembly resolution 57/167 of 18 December 2002, in which it endorsed the Political Declaration and the Madrid International Plan of Action on Ageing, and subsequent resolutions No. 59/150 of 01 February 2005 on the Follow-up to the Second World Assembly on Ageing;

**Welcoming** UN General Assembly resolution 70/1 of 25 September 2015, in which the General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, and stressing the need to ensure that issues of relevance to older persons are taken into account in its implementation in order to ensure that no one is left behind, including older persons;

**Recognizing** that the ageing population in many countries in Asia is rapidly growing whereas the fertility rates in those respective countries are significantly declining;

**Acknowledging** that the older persons in Asia are expected to account for over 17 percent by 2030, due to higher life expectancy;

**Being concerned** that misconception and prejudice remains a challenge to opportunity for and engagement of older persons in productive employment in some countries, taking into account the unique culture of respect towards older persons in Asia;

**Being mindful** that public adaptation and preparedness through a life-course, multifaceted approach are keys to help society effectively respond to the burdens as commonly regarded in aged society;

**Acknowledging** that older persons have made significant contribution to national social and economic gains and, therefore, enactment of effective legislation should be encouraged to remove barriers in realizing full potential of older persons;

*We therefore,*

1. **Calls upon** APA Member Parliaments to consider developing and adopting legislations on social protection, health-care services, and employment opportunities for older persons, as well as exploring innovative legislations such as phased-retirement, job sharing and part-time works;
2. **Encourage** APA Member Parliaments to monitor the implementation of their respective governments' ageing policies and to accord priority to the availability of evidence-based, accurate, reliable and up-to-date data and information in order to ensure effective, efficient and sustainable implementation;
3. **Urge** APA Member Parliaments to exercise their constituent authority to maximize opportunities for older persons, including through promoting flexible work and alternative employability arrangements, as appropriate;
4. **Encourage** APA Member Parliaments to work with their relevant constituencies and community-based mechanisms to promote an enabling volunteer environment for older persons, taking into account different social contexts and norms;
5. **Encourage** APA Member Parliaments to develop legislation and policies to promote an enabling environment to the lives of older persons and to proactively provide services to them and improve the quality of such services, particularly health services;
6. **Stress** the importance of promoting and supporting international efforts, particularly the efforts exerted by the United Nations, as the UN launched a set of goals that include raising awareness of the health needs of the older persons and their contributions to the communities in which they live, and a better understanding of Covid19 pandemic's impact on them in order to achieve the 2030 sustainable development objectives;
7. **Call on** member parliaments to encourage their governments to continuously launch programs, initiatives, and events in social development centers in Asian countries in cooperation with the government and national institutions to raise awareness among all segments of society about the needs of the older persons, on the one hand, motivate the older persons and consolidate their role on the other hand. This, in turn, shall actuate all aspects of the active lives of older persons, and ensure their active and continuous participation in their communities.

8. **Encourages** the international community and the relevant agencies of the United Nations system, within their respective mandates, to support national efforts to provide funding for research and data-collection initiatives on ageing, as appropriate, in order to better understand the challenges and opportunities presented by population ageing and to provide policymakers with more accurate and more specific information with regard to ageing, as well as to include indicators that provide an evidence base for the equitable delivery and effective monitoring of the implementation of the Sustainable Development Goals, the New Urban Agenda 20 and national policymaking, as well as to gain a better understanding of how to promote ageing in a way that is not adversely affected by rapid urbanization and gentrification;.



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/13

22 September 2023

Azerbaijan

## Draft Resolution on Human Development in Asia

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Recalling** our commitment to the United Nations Sustainable Development Goals for the years 2015-2030, which includes poverty eradication and focuses on providing good health, welfare, gender equality, appropriate education and work, and economic growth; Especially in view of the need to contain the repercussions of the Covid-19 pandemic outbreak on these areas in the countries of the continent; and the need for response and recovery policies from the pandemic to include a guarantee that reverses the negative impact of the pandemic on it; and the return of the sustainable development process to the right track;

**Reaffirming** on APA Goals to harness cooperation to use enormous human and natural resources, and to ensure the interests of all member states;

**Reminding** parliament members of APA to take collective procedures for supporting governments and other active parties in the region, and to promote the exchange of opinions and expertise with parliaments from other regions, in the context of poverty eradication and promoting equality;

**Recognizing** that human development is an extensive and accumulative process that, bears not only financial and economic aspects, but also covers social, cultural, health, natural environment and political domains, with an ultimate goal of human prosperity;

**Taking into consideration** acts related to the UN Development Program (UNDP) particularly the Human Development Report 2020: The next frontier: Human Development and Anthropocene;

**Emphasizing** that the human element is the basis of renaissance and material development in different societies;

**Emphasizing** the fundamental role of parliaments through the enactment of legislation, budget adoption, and their role in ensuring human development;

**Affirming** on the need to train Asian human resources to realize one of the most important feature of economic globalization by enhancing their competitive capabilities in the world market while utilizing the dynamics of globalization in which the balance of economic power keeps changing;

*We therefore,*

1. **Encourage** setting a unified criterion for national capacity building;
2. **Urge** developed countries and also regional United Nation office in Asia to support the proposed training center project and encourage their parliaments to take steps towards the realization of this goal in compliance with the United Nations Sustainable Development Goals;
3. **Call on** APA Member Parliaments to increase the budgetary allocations for education, health, and housing for their direct impact on developing human capital, offer adequate opportunities for the human element for creativity, innovation, and active participation in looking ahead;
4. **Also call on** APA Member Parliaments to create strategic partnerships and work closely with governments and public institutions on issues related to promoting human development.





Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/14

22 September 2023

Azerbaijan

## Draft Resolution on Tourism Cooperation in Asia

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Recalling** our commitment to the resolution adopted by the United Nations General Assembly on 25 September 2015, titled “Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (A/RES/70/1), which exhorts to develop and implement policies to promote more resilient, inclusive and sustainable tourism sector, and acknowledges the role of tourism in creating jobs and promoting local culture and products as well as preserving them for the future generations and UN General Assembly resolution A/RES/75/229 on Promotion of sustainable tourism, including ecotourism, for poverty eradication and environment protection;

**Recalling** its resolution 2017/12 Resolution on The Role of APA Parliaments in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals;

**Recognizing** that sustainable tourism, including ecotourism, health tourism, cultural tourism, pilgrimage tourism is a cross-cutting activity that effectively contribute to the three dimensions of sustainable development and the achievement of the Sustainable Development Goals, including by fostering economic growth, alleviating poverty, creating full and productive employment and decent work for all, accelerating the change to more sustainable consumption and production patterns and promoting the sustainable use of oceans, seas and marine resources, promoting local culture, improving the quality of life and the economic empowerment of young people and development of better living conditions for rural populations;

**Being cognizant** of the economic significance of the tourism and travel sectors as well as their roles in achieving the Sustainable Development Goals, in particular in the protection of cultural and natural heritage and contribution to enhanced mutual understanding and better relations among peoples as a platform for peace and stability and acknowledging the contribution of tourism industry to the economic development of the societies and as a tool for promoting understanding, peace and prosperity among nations;

**Underlining** the vast potential of the our region in the field of tourism and its ability to increase the region’s share in global tourism and calling upon the need for protection and conservation of its natural and cultural heritage and safeguarding cultural richness, natural beauty, social values as well as local communities and traditions of the indigenous peoples;

**Re-emphasizing** cultural diversity and protection of cultural heritage in Asia and recognizing the potential of multilateral regional frameworks such as the Asia Cooperation Dialogue (ACD), an Asia wide forum which declared “culture and tourism” as well as “education and human resource development” as two out of its six priority areas of cooperation;

**Considering** the deep-rooted, comprehensive and ever-growing relations between the Asian Parliamentary Assembly Member States, including in trade, tourism and travel as well as the need to make best use of this potential;

**Recognizing** the significant role of parliaments in promoting tourism industry, which employs and provides livelihoods to high number of people in the Member Countries;

**Noting** the initiatives launched and the events organized at the sub regional, regional and international levels in the field of sustainable tourism;

**Highlighting** promotion of dialogue and harmony among followers of World Religions and different faiths;

**Emphasizing** that simplified procedures that will encourage travels among the Member Countries for touristic purposes will not only help our people interact more, will also make our destinations of cultural and historical values better-known to our people;

*We, therefore,*

- 1. Recognize** that tourism plays a significant role in strengthening people to people contact, cultural cooperation and social and economic development, which will contribute to the regional integration and connectivity in Asia;
- 2. Encourage** enhanced dialogue and cooperation in the areas of culture and tourism among the Asian Parliamentary Assembly Member Countries, also within the framework of relevant multilateral fora;
- 3. Promote** Inter- regional tourism cooperation through regional integration organizations particularly ASEAN, ECO, OIC and other existing platforms and support regional tourism exchanges particularly for persons engaged in the tourism industry;
- 4. Encourage** regional guidelines by competent institutions that will facilitate comfortable, safe and healthy travel among the Asian Parliamentary Assembly Membercountries;
- 5. Promote** Silk Road tourism through arranging events and festivals and in cooperation with the international community and relevant organizations will be revived;
- 6. Call for** the mobilization of our resources in all tourism-related areas and sectors such as transportation, accommodation, gastronomy, public health by relevant institutions, and ensuring broader participation of all stakeholders to generate a sustainable structure in tourism and travel sectors;

7. **Establish** our region as a peaceful and green tourism destination with diverse products and high quality services while ensuring responsible and sustainable tourism development and upgrading quality of life of the people through effective involvement of all stake holders throughout the process;
8. **Encourage** our citizens to travel to the Member Countries and to work with our respective tour operators, airlines, hotels and all relevant stakeholders and ensure close cooperation between our respective tourism, transportation and health authorities;
9. **Invite** the Members of the Asian Parliamentary Assembly to undertake concrete steps in line with the principles put forward by the United Nation World Tourism Organization to initiate multilateral mechanisms to further re-energize and promote tourism sector by coordinating and aligning efforts and measures taken by each nation in Asia;
10. **Support** to establish a cooperative regional mechanism such as Asian Tourism Forum under the aegis of the Asian Parliamentary Assembly, with participation of stakeholders across different levels of public and private sectors, in order to promote the tourism sector;
11. **Facilitate** Visa procedures for the citizens of the Region;
12. **Strengthen** and diversify tourism health/medical, culture, winter, sea, mountain desert, religious and other niche areas/domains;
13. **Support** utilization of electronic media, human resource development and capacity building activities;
14. **Devise** and promote green tourism strategy in collaboration with international tourism bodies;
15. **Encourage** private sector and local community involvement in the tourism activities will be strengthened;
16. Requests the Secretariat to submit to the next meeting of...a report on the implementation of the present resolution, including recommendations on ways and means to promote sustainable tourism in Asia, in a balanced and integrated manner;



Asian  
Parliamentary  
Assembly

SC-Social and Cultural Affairs/Draft Res/2023/15  
22 September 2023  
Azerbaijan

## Draft Resolution on the Commission on Women

*We, the Members of the Asian Parliamentary Assembly,*

**Recalling** that the proposal to establish the Commission on Women was put forward and adopted at the 13th Plenary Session of APA held on 10 January, 2023 in Antalya, Republic of Türkiye;

**Recognizing** that despite the implementation of certain measures and decisive efforts towards the protection of women's rights and the elimination of gender discrimination in the Asian region, serious problems still exist in this area;

**Drawing attention to** the fact, that during armed conflicts in the Asian region, women and children become the most vulnerable social group and they experience the consequences of violence and human rights abuses, suffer from displacement, loss, poverty, and disintegration of families;

**Underlining** that the regional conflicts exacerbate already existing forms of discrimination against women and girls and put them at risk of human rights abuses;

**Taking into account** the need to take effective measures to protect refugee and internally displaced women from violence;

**Considering** the negative impact and bitter consequences of the COVID- 19 pandemic on women;

**Realizing** that gender-based discrimination, women trafficking, violence against women, domestic violence, sexual exploitation of women and girls are widespread in the Asian region;

**Stressing** the existence of serious problems, related to the increase in the number of out-of-school girls and its negative consequences;

**Noting that widespread** early marriages, limit the life prospects of young girls, hinder their opportunities to study and work, increase pregnancy-related health risks and lead to maternal mortality;

**Underlining** the low level of participation of women in political life and low level of representation of women in parliaments and governments, the importance of recognizing women's participation in decision-making as a requirement for justice and democracy, as well as a necessary condition for taking into account their interests;

**Realizing** the impossibility of achieving the goals of equality, development and peace without the active participation of women at all levels of decision-making;

**Stressing** the importance of measures to increase the number of women in decision-making leadership positions in civil service, business, civil society and all other areas of society;

**Noting** the non-participation or weak representation of women in economic decision-making, including the process of forming rules in the financial, monetary, commercial and tax sphere;

**Noting** the existence of gaps in the legislation of certain states regarding women's rights, and women empowerment the fact that certain states lack proper women's support programs and strategies, while in some other states such programs are not implemented in a sufficient and timely manner;

**Underlining** lack of awareness in the field of women's rights and gender equality in society and in the mainstream media;

**Being aware** that the violation of women's rights and the existence of gender discrimination are among the biggest challenges in the field of human rights;

**Guided** by the purposes, principles and provisions of the Charter of the United Nations;

**Considering** some relevant international conventions as well as the decisions of the Fourth World Conference on Women (Beijing, 1995) and its subsequent periodic follow-up conferences have all developed a comprehensive framework for the protection and empowerment of women and girls, eliminating all forms of discrimination against them;

**Recalling** the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development (excluding any conflicting clauses to Sharia), recognizing its universal, integrated and indivisible nature, and acknowledging that the 2030 Agenda, inter alia, addresses the elimination of all forms of violence against all women and girls, as well as ending all forms of discrimination against all women and girls,

**Remembering** the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol to Present, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, which provides a framework to effectively prevent and combat trafficking in persons,

**Recognizing** the need for the collection of information on the situation of women's rights;

**Stressing** that if urgent measures are not taken by states and international organizations to solve the mentioned problems, the risk of aggravation of the current situation will increase;

**Taking into account** that keeping the issue of protecting women's rights and elimination of gender inequality at the forefront of the APA activities will be expedient

We therefore,

1. **Decide** to establish the Commission on Women within the framework of the APA, which will make a significant contribution to the elimination of discrimination against women in Asian countries.
2. **Decide** that the Commission should mobilize the efforts and resources of APA Member Parliaments to draw attention to women's rights and gender equality problems and increase awareness on this issue on a systematic basis;
3. **Decide** that the Commission should support the creating conditions for women to fully exercise their political, economic, social, cultural and civil rights;
4. **Decide** that the Commission should contribute to the raising awareness about the situation of women in the member states;
5. **Decide** that the Commission should encourage APA Member Parliaments to strengthen the legal framework for the protection of women and girls in order to end violence and inequality;
6. **Decide** that the Commission shall encourage APA Member Parliaments to contribute to the strengthening of relevant national institutions on women's rights issues to improve the situation of women;
7. **Decide** that the Commission shall provide the consideration of women's rights and gender equality issues within the framework of APA's activities;
8. **Decide** that the Commission shall, inter alia:
  - (a) Play the role of a data collection mechanism on the situation with women's rights and gender equality in member states;
  - (b) Discuss the problems related to women's rights and gender equality within the framework of APA,
  - (c) Make recommendations to the Executive Council of APA and Plenary, contributing to the process of solving existing problems in the sphere of women's rights and gender equality;
  - (d) Submit an annual report on the situation with women in member states to the APA Plenary Sessions;
  - (e) Implement the systematic cooperation with other bodies of APA in order to more effectively promote the protection of women's rights;

- (f) Support the implementation of gender quotas regarding the composition of delegations in APA;
  - (g) Act as a mechanism for supporting women MP;
  - (h) Establish the relations between APA and committees on women's rights issues existing in national parliaments;
  - (i) Organize the relevant seminars and consultations in the sphere of women's rights and gender equality
9. **Decide** that the Commission shall be composed of one APA delegate from each Member Parliament. The Commission shall have a Chairperson, Vice- Chairperson, and Rapporteur, taking into consideration equitable geographical distributions. The Chairperson, Vice-Chairpersons, and Rapporteur will be elected from among the APA members for a two-year term of office by consensus. The annual meeting of the Commission shall be convened by the Member Parliament hosting the previous Plenary, unless following mutual agreement of the President and the Permanent Secretariat, they may be hosted by another Member Parliament (Rule 15.3 of the Rules of Procedure of the Plenary of the Asian Parliamentary Assembly).
10. **Call upon** APA Member Parliaments to take an active part in the activities of the Commission on Women being created.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## BKSAP DPR Terus Berkontribusi dalam Memperkuat Majelis Parlemen Asia

24-09-2023 /B.K.S.A.P.



*Para delegasi Indonesia berfoto bersama di sela-sela menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya, Asian Parliamentary Assembly (APA) atau Majelis Parlemen Asia di Baku, Azerbaijan. Foto: Eko/nr*

Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon bersama dengan Wakil Ketua BKSAP Sukamta dan Achmad Hafisz Tohir, serta Anggota BKSAP Agustina Wilujeng Pramestuti, Putri Anetta Komarudin, Didi Irawadi Syamsuddin, menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya, Asian Parliamentary Assembly (APA) atau Majelis Parlemen Asia. Dalam sidang ini, BKSAP mendorong penguatan organisasi APA dalam implementasi resolusi dan juga evaluasi program-program tersebut serta mendukung pembentukan komite perempuan di APA.



“APA ini masih dalam sebuah proses formasi, dan kita terus berkontribusi di dalam pemikiran bagaimana memperbaiki organisasi parlemen asia supaya mekanismenya lebih tangguh lebih kuat, *power full*, solid seperti Parlemen Eropa,” papar Fadli di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9/2023).

Sidang Komite Sosial dan Budaya APA yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan ini menekankan pentingnya peran APA dalam memperluas kerjasama antara parlemen-parlemen Asia. Fadli berharap kerjasama Parlemen Asia dapat mewujudkan ikatan kerjasama yang produktif antar negara-negara Asia, baik kerjasama dalam hal kebudayaan, ekonomi dan sebagainya.

“Jadi kami termasuk yang berpendapat harusnya yang telah diadopsi di dalam resolusi-resolusi selama ini bisa dijalankan kemudian ada proses evaluasi-evaluasi juga pelaporan. Ini yang kami sampaikan juga di dalam pertemuan di Baku, Azerbaijan bagaimana organisasi parlemen ini bisa lebih efektif,” jelas Fadli.

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menyinggung soal kesekretariatan Organisasi APA agar semakin hari semakin solid dan tertata rapi. Meskipun keragaman bangsa dan budaya di Asia sangat heterogen, solidaritasnya akan menjadi kekuatan bagi organisasi APA, maka menjadi tantangan yang sangat besar untuk mewujudkannya.

“Demikian juga memperkuat kesekretariatan, dan juga sedang dibicarakan mekanisme iuran masing-masing anggota di Asia. Dan suatu hari semoga bisa terbentuk Parlemen Asia yang lebih solid meskipun tantangannya cukup besar karena Asia ini keregamannya luar biasa tidak bisa dibandingkan dengan Eropa yang relatif homogen,” ungkap Fadli.

Dia mengatakan di Asia semua budaya dan peradaban terwakili. “Inilah saya kira satu tantangan yang besar untuk kita bagaimana parlemen-parlemen Asia yang merupakan perwakilan rakyat dari negara-negara di Asia ini bisa bersatu dan solid dalam membicarakan persoalan yang ada di Asia maupun di dunia,” jelas Fadli. (ssb/aha)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## Fadli Zon: Dibutuhkan Terobosan Baru dalam Keorganisasian Majelis Parlemen Asia

24-09-2023 / B.K.S.A.P.



*Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam foto bersama di sela-sela kunjungan menghadiri Asian Parliamentary Assembly/APAdi Azerbaijan. Foto: Eko/nr*

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, bertemu dengan Ketua Parlemen Azerbaijan Milli Majlis Sahiba Gafarova. Pertemuan dilakukan bersamaan dengan kunjungan Delegasi DPR RI ke Azerbaijan untuk menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA). Dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya peran APA dalam memperluas kerjasama antara parlemen-parlemen Asia.

Kedua belah pihak saling mengapresiasi setinggi-tingginya terkait hubungan baik Azerbaijan dan Indonesia sampai saat ini. Tercatat, Azerbaijan dan Indonesia yang tahun lalu merayakan 30 tahun terjalannya hubungan diplomatik, dan telah bekerja sama erat di sejumlah organisasi parlemen internasional, antara lain IPU, NAM-PN (Non Blok), PIUC dan Azerbaijan sendiri adalah negara observer dalam AIPA.

“Pada saat yang sama, Sahiba Gafarova menyebutkan sangat bangga dengan penerimaan Milli Majlis Azerbaijan sebagai anggota pengamat Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) dan menekankan pentingnya organisasi kawasan tersebut,” ungkap Fadli di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9/2023).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, dalam organisasi Jaringan Parlemen Gerakan Non-Blok, delegasi parlemen Indonesia ikut serta dalam Konferensi NAM-PN di Baku pada tahun 2022. Pada tahun itu Ketua Milli Majlis, Sahiba Gafarova, juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Pada kunjungan terakhirnya ke Indonesia, pertemuannya dengan Ketua DPR Puan Maharani, serta prospek pengembangan hubungan antar parlemen kedua negara,” ujar Fadli.

Fadli Zon, selaku Ketua Delegasi DPR RI, tak lupa juga menyampaikan terima kasih atas keramahtamahan yang diberikan kepada delegasi dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara APA secara tingkat tinggi. Dia mencatat bahwa Indonesia sangat memperhatikan dan mengutamakan pengembangan hubungan dengan Azerbaijan lebih lanjut di banyak bidang.

Bahkan atas nama BKSAP DPR RI, Fadli Zon memberikan dukungan atas pencalonan Azerbaijan dalam keketuaan pada APA untuk periode 2024-2026. Ia berharap akan ada terobosan-terobosan baru dalam organisasi ini terutama dalam penerapan resolusi yang telah diadopsi dan juga monitoring dan evaluasi atas implementasi resolusi tersebut. (ssb/aha)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## BKSAP Sambut Baik Pembentukan Komisi Perempuan dalam Sidang APA di Azerbaijan

25-09-2023 / B.K.S.A.P.



*Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin di sela-sela menghadiri Sidang Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Baku, Azerbaijan. Foto: Eko/nr*

Dalam Sidang Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan memberikan perhatian khusus pada pembentukan komite perempuan. Menyambut hal tersebut Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyampaikan, dengan pembentukan Komisi Perempuan ini menjadi salah satu bentuk keseriusan, sehingga harapannya nanti setelah ada komisi perempuan, anggota APA bisa memantau keterwakilan perempuan di legislatif di masing masing keanggotaan APA.

“Kita sangat menyambut baik dengan adanya komisi perempuan ini, karena menurut kita representasi perempuan dalam kebijakan publik dan pemerintahan akan bisa didorong apabila ada keseriusan dari masing-masing negara anggota APA,” papar Putri di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9/2023).

Di kesempatan yang sama, Ketua BKSAP Fadli Zon pun berpendapat posisi perempuan di Asia sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus. “Komite untuk parlemen perempuan. Jadi di APA ini dibicarakan tentang women parlementarian, tapi bagian dari standing committee sosial dan budaya. Kita melihat ini sangat penting karena posisi perempuan di Asia ini agak berbeda dan memang ada hal-hal yang sifatnya krusial,” jelasnya.

Menurut Putri, prinsip yang paling penting dalam pembentukan komisi perempuan adalah kesetaraan, karena di berbagai industri termasuk di dalam sektor politik masih banyak sekali kesempatan-kesempatan yang belum bisa dicapai oleh perempuan. Dia berpendapat hal tersebut terjadi karena masih ada bias gender dan masih ada kultur patriarki di berbagai negara Asia.

“Kita merepresentasikan anggota parlemen perempuan dari DPR RI, yang menurut kita paling penting adalah resolusi yang diajukan Azerbaijan sebagai tuan rumah untuk membentuk komisi perempuan dari APA itu sendiri,” ungkap Politisi dari Fraksi partai Golkar ini.

Melalui organisasi APA ini, para anggota parlemen bisa saling berbagi pengalaman dalam berbagai macam hal termasuk dalam menjunjung kesetaraan gender. “Kita juga bisa belajar bagaimana negara-negara APA yang sudah lebih sukses dalam mendorong representasi perempuan, juga mendorong agar perempuan bisa bertahan di dunia politik dan tentu menyuarakan kepentingan perempuan di dalam pembentukan undang-undang dan juga kebijakan pengawasan serta anggaran yang responsif gender,” jelas Putri.

Dia pun berharap agar perempuan dan laki-laki di Indonesia memiliki kesempatan yang sama di dalam dunia kerja dan edukasi. “Dan tidak banyak lagi adik-adik kita di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang perempuan dipaksa untuk menikah sebelum usianya, atau pun dipaksa bekerja padahal belum menyelesaikan edukasinya dan ini harusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah, juga karena kalau kita mau maju perempuan harus berkontribusi penuh pada ekonomi kita,” ungkap Putri. (sfb/aha)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## Puteri Komarudin Usulkan Pentingnya Inklusi Keuangan bagi Perempuan dalam Resolusi APA

25-09-2023 / B.K.S.A.P.



*Anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin saat mengikuti Sidang Majelis Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9/2023). Foto: Eko/nr*

Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pentingnya inklusi keuangan bagi perempuan untuk diadopsi dalam naskah resolusi Komite Tetap Bidang Sosial dan Budaya dalam Majelis Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) saat bersidang di Baku, Azerbaijan pada 20 - 23 September.

“Kami mengusulkan untuk memasukkan aspek keuangan dalam naskah resolusi ini. Inklusi keuangan menjadi aspek penting untuk mencapai ekonomi yang inklusif, khususnya bagi perempuan. Apalagi ternyata menurut Bank Dunia, akses keuangan bagi perempuan masih tertinggal sekitar 4 persen dibandingkan laki-laki. Bahkan, di negara berkembang, kesenjangan ini jauh lebih dalam sekitar 6 persen,” ungkap Puteri di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9/2023).

Dalam pembahasan resolusi pada Komisi Perempuan, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini pun menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan untuk memperoleh akses keuangan yang setara. “Masih banyak hambatan-hambatan yang muncul di lapangan, seperti terbatasnya akses terhadap telepon seluler, jarak geografis dari cabang bank/layanan keuangan, hingga rendahnya literasi keuangan. Hal-hal itulah yang terus menghambat kemampuan perempuan untuk terlibat dalam sistem keuangan formal,” ujar Puteri.

Pertemuan Komite Tetap ini membahas 16 naskah resolusi di beberapa aspek, diantaranya perlindungan warisan budaya, teknologi informasi dan komunikasi, kesetaraan akses kesehatan, anggota parlemen perempuan, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, keagamaan, pariwisata, bantuan kemanusiaan, serta komisi perempuan.

Selain terkait inklusi keuangan bagi perempuan, Puteri juga memberikan penekanan untuk dapat memberikan perhatian serius terhadap diskriminasi gender di kawasan Asia. “Hal ini karena diskriminasi gender menghambat kebebasan perempuan, baik kebebasan dari kekerasan seksual, hak seksual dan reproduksi, akses terhadap keadilan, kesetaraan sosial-ekonomi, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan,” ungkap Puteri.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir, dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta. Turut hadir Anggota BKSAP DPR RI yaitu Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Didi Irawadi Syamsuddin. (ssb/aha)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## Negara Anggota APA akan Pererat Hubungan guna Peningkatan Pariwisata Berbasis Sosial dan Budaya

25-09-2023 / B.K.S.A.P.



*Anggota BKSAP DPR RI Agustin Wilujeng Pramestuti saat mengikuti sidang Majelis Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan. Foto: Eko/nr*

Pada kesempatan sidang Majelis Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan, Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Agustin Wilujeng Pramestuti mengungkapkan bahwa negara-negara anggota APA akan semakin mempererat hubungan guna peningkatan pariwisata berbasis sosial dan budaya dan yang tak kalah penting adalah warisan berbasis budaya. Hal tersebut menarik perhatiannya karena menyangkut tugas dan wewenang di Komisi X, sektor yang dia emban sekarang.



“Ada resolusi yang dihasilkan di pertemuan ini, masing-masing negara akan meningkatkan hubungan untuk membangun sebuah upaya peningkatan pariwisata yang berbasis sosial dan budaya serta *heritage* atau warisan budaya,” papar Agustina di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9/2023).

Menurut Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini, di negara-negara Asia kebudayaan dan warisannya sangat kaya, beberapa negara sudah berhasil melakukan membangun pariwisata berbasis budaya dan kultur. Dan menurut Agustina, warisan budaya menjadi destinasi wisata yang menghasilkan devisa yang luar biasa. “Kita belum, kita on the way that, kita menuju ke sana. Itulah mengapa kita sedang menginisiasi revisi undang-undang pariwisata,” ujarnya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas BKSAP, dia telah mendapat materi yang berlimpah guna peningkatan pariwisata nasional. “Saya juga mendapatkan materi yang cukup banyak dari negara-negara yang hadir di sini, bahwa pariwisata dengan mengandalkan warisan budaya dan kekuatan budaya itu bisa menjadi modal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ungkap Agustina.

Dalam sidang Majelis Parlemen Asia yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan mulai 20 sampai dengan 23 September, Agustina merasa mendapat pelajaran dan pengalaman yang luar bisa guna peningkatan pariwisata di Indonesia. “Kita lihat di Baku, Azerbaijan, bagaimana mereka mempertahankan lanskap dan arsitektur kuno yang disatukan dengan arsitektur modern, bagus banget. Lalu dengan niat yang amat sangat, mereka berusaha memamerkan keindahan lautan kaspia, padahal laut kaspia sama dengan laut-laut yang lain,” jelasnya.

Agustina juga melihat di Azerbaijan, dukungan pemerintah setempat dalam bidang infrastruktur sudah sampai pelosok daerah. Menurutnya hal ini bisa menjadi inspirasi bahwa ketika fokus ke satu destinasi, wilayah lainnya yang menjadi penyangga juga ikut dibangun secara terintegrasi. Kesepakatan peningkatan kerjasama dalam sidang APA kali ini akan ditindaklanjuti pemerintah melalui kementerian dan pemangku kepentingan yang ada.

“Di Azerbaijan kita melihat dukungan infrastruktur ke seluruh pelosok, mungkin di kita sekarang kekuatan keuangan hanya di lima destinasi super prioritas, sepertinya di Azerbaijan ini sudah menyeluruh karena ini negara kaya raya, negara penghasil minyak termasuk terbesar di dunia. Dan menurut saya bisa menjadi inspirasi bahwa ketika fokus ke satu destinasi yang lainnya wilayah penyangga juga ikut dibangun dan terintegrasi,” jelas Agustina. (ssb/aha)

© 2016 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.



# Fadli Zon: Keorganisasian Majelis Parlemen Asia Butuh Terobosan Baru

[Berita Parlemen](#) Rabu, 27 September 2023 13:33



JAKARTA, Fraksigerindra.id — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI [Fadli Zon](#), bertemu dengan Ketua Parlemen Azerbaijan Milli Majlis Sahiba Gafarova. Pertemuan dilakukan bersamaan dengan kunjungan Delegasi DPR RI ke Azerbaijan untuk menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA). Dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya peran APA dalam memperluas kerjasama antara parlemen-parlemen Asia.

Kedua belah pihak saling mengapresiasi setinggi-tingginya terkait hubungan baik Azerbaijan dan Indonesia sampai saat ini. Tercatat, Azerbaijan dan Indonesia yang tahun lalu merayakan 30 tahun terjalannya hubungan diplomatik, dan telah bekerja sama erat di sejumlah organisasi parlemen internasional, antara lain IPU, NAM-PN (Non Blok), PIUC dan Azerbaijan sendiri adalah negara observer dalam AIPA.

“Pada saat yang sama, Sahiba Gafarova menyebutkan sangat bangga dengan penerimaan Milli Majlis Azerbaijan sebagai anggota pengamat Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) dan menekankan pentingnya organisasi kawasan tersebut,” ungkap Fadli di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9/2023).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, dalam organisasi Jaringan Parlemen Gerakan Non-Blok, delegasi parlemen Indonesia ikut serta dalam Konferensi NAM-PN di Baku pada tahun 2022. Pada tahun itu Ketua Milli Majlis, Sahiba Gafarova, juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Pada kunjungan terakhirnya ke Indonesia, pertemuannya dengan Ketua DPR Puan Maharani, serta prospek pengembangan hubungan antar parlemen kedua negara,” ujar Fadli.

Fadli Zon, selaku Ketua Delegasi DPR RI, tak lupa juga menyampaikan terima kasih atas keramahamahan yang diberikan kepada delegasi dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara APA secara tingkat tinggi. Dia mencatat bahwa Indonesia sangat memperhatikan dan mengutamakan pengembangan hubungan dengan Azerbaijan lebih lanjut di banyak bidang.

Bahkan atas nama BKSAP DPR RI, Fadli Zon memberikan dukungan atas pencalonan Azerbaijan dalam keketuaan pada APA untuk periode 2024-2026. Ia berharap akan ada terobosan-terobosan baru dalam organisasi ini terutama dalam penerapan resolusi yang telah diadopsi dan juga monitoring dan evaluasi atas implementasi resolusi tersebut.

# BKSAP DPR Terus Berkontribusi Memperkuat Majelis Parlemen Asia

Laporan oleh Farid Kusuma

Minggu, 24 September 2023 | 10:20 WIB

Bagikan



X

*Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Gerindra. Foto: Dok./Faiz suarasureabaya.net*

Fadli Zon Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Achmad Hafisz Tohir Wakil Ketua BKSAP, Sukamta dan Agustina Wilujeng Pramestuti, Putri Anetta Komarudin, Didi Irawadi Syamsuddin Anggota BKSAP, menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya, Asian Parliamentary Assembly (APA) atau Majelis Parlemen Asia.

Dalam sidang itu, BKSAP mendorong penguatan organisasi APA dalam implementasi resolusi dan juga evaluasi program-program tersebut serta mendukung pembentukan komite perempuan di APA.

“APA ini masih dalam sebuah proses formasi, dan kami terus berkontribusi di dalam pemikiran bagaimana memperbaiki organisasi parlemen asia supaya mekanismenya lebih tangguh lebih kuat, *powerfull*, solid seperti Parlemen Eropa,” papar Fadli di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9/2023).

Sidang Komite Sosial dan Budaya APA yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan menekankan pentingnya peran APA dalam memperluas kerjasama antara parlemen-parlemen Asia.

Fadli berharap kerja sama Parlemen Asia dapat mewujudkan ikatan yang produktif antarnegara-negara Asia, baik kerja sama sektor kebudayaan, ekonomi dan sebagainya.

“Jadi, kami termasuk yang berpendapat harusnya yang telah diadopsi di dalam resolusi-resolusi selama ini bisa dijalankan kemudian ada proses evaluasi-evaluasi juga pelaporan. Ini yang kami sampaikan juga di dalam pertemuan di Baku, Azerbaijan bagaimana organisasi parlemen ini bisa lebih efektif,” jelasnya.

Lebih lanjut, politikus dari Fraksi Partai Gerindra juga menyinggung soal kesekretariatan Organisasi APA agar semakin hari semakin solid dan tertata rapi.

Walau pun keragaman bangsa dan budaya di Asia sangat heterogen, solidaritasnya akan menjadi kekuatan bagi organisasi APA, maka menjadi tantangan yang sangat besar untuk mewujudkannya.

“Demikian juga memperkuat kesekretariatan, dan juga sedang dibicarakan mekanisme iuran masing-masing anggota di Asia. Dan suatu hari semoga bisa terbentuk Parlemen Asia yang lebih solid meskipun tantangannya cukup besar karena Asia ini keregamanya luar biasa tidak bisa dibandingkan dengan Eropa yang relatif homogen,” imbuhnya.

Dia menambahkan, di Asia semua budaya dan peradaban terwakili. “Inilah saya kira satu tantangan yang besar untuk kita bagaimana parlemen-parlemen Asia yang merupakan perwakilan rakyat dari negara-negara di Asia ini bisa bersatu dan solid dalam membicarakan persoalan yang ada di Asia mau pun di dunia,” tandasnya.(rid)

# Fadli Zon Tekankan Pentingnya Peran APA Dalam Hubungan Antar Parlemen Asia

Redaktur **Ali Rachman**

Senin, 25 September 2023 - 12:13

di kanal **Nasional**



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Dok. DPR RI

**INDOPOS.CO.ID** – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, bertemu dengan Ketua Parlemen Azerbaijan Milli Majlis, Sahiba Gafarova. Pertemuan dilakukan bersamaan dengan kunjungan Delegasi DPR RI ke Azerbaijan untuk menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA).

Menurut Fadli Zon, dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya peran APA dalam memperluas kerjasama antara parlemen-parlemen Asia.

Kedua belah pihak, katanya, saling mengapresiasi setinggi-tingginya terkait hubungan baik Azerbaijan dan Indonesia sampai saat ini. Tercatat, Azerbaijan dan Indonesia yang tahun lalu merayakan 30 tahun terjalinnya hubungan diplomatik, dan telah bekerja sama erat di sejumlah organisasi parlemen internasional, antara lain IPU, NAM-PN (Non Blok), PIUC dan Azerbaijan sendiri adalah negara observer dalam AIPA.

“Pada saat yang sama, Sahiba Gafarova menyebutkan sangat bangga dengan penerimaan Milli Majlis Azerbaijan sebagai anggota pengamat Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) dan menekankan pentingnya organisasi kawasan tersebut,” ungkap Fadli di Baku, Azerbaijan, sebagaimana keterangannya di Jakarta. Senin (25/9/2023).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, dalam organisasi Jaringan Parlemen Gerakan Non-Blok, delegasi parlemen Indonesia ikut serta dalam Konferensi NAM-PN di Baku pada tahun 2022. Pada tahun itu Ketua Milli Majlis, Sahiba Gafarova, juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Pada kunjungan terakhirnya ke Indonesia, pertemuannya dengan Ketua DPR Puan Maharani, serta prospek pengembangan hubungan antar parlemen kedua negara,” ujar Fadli.

Fadli Zon, selaku Ketua Delegasi DPR RI, tak lupa juga menyampaikan terima kasih atas keramahamahan yang diberikan kepada delegasi dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara APA secara tingkat tinggi. Dia mencatat bahwa Indonesia sangat memperhatikan dan mengutamakan pengembangan hubungan dengan Azerbaijan lebih lanjut di banyak bidang.

Bahkan atas nama BKSAP DPR RI, Fadli Zon memberikan dukungan atas pencalonan Azerbaijan dalam keketuaan pada APA untuk periode 2024-2026. Ia berharap akan ada terobosan-terobosan baru dalam organisasi ini terutama dalam penerapan resolusi yang telah diadopsi dan juga monitoring dan evaluasi atas implementasi resolusi tersebut. **(dil)**

# BKSAP DPR Sambut Baik Pembentukan Komisi Perempuan dalam Sidang APA di Azerbaijan

Redaktur **Ali Rachman**

Senin, 25 September 2023 - 12:55

di kanal **Nasional**



Anggota BKSAP DPR Putri Komarudin. Foto: Dok. DPR RI

**INDOPOS.CO.ID** – Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putri Anetta Komarudin mengapresiasi Sidang Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan yang berakhir pada 23 September kemarin telah memberikan perhatian khusus pada pembentukan komite perempuan.



Menurutnya, dengan pembentukan Komisi Perempuan ini menjadi salah satu bentuk keseriusan, sehingga harapannya nanti setelah ada komisi perempuan, anggota APA bisa memantau keterwakilan perempuan di legislatif di masing-masing keanggotaan APA.

“Kita sangat menyambut baik dengan adanya komisi perempuan ini, karena menurut kita representasi perempuan dalam kebijakan publik dan pemerintahan akan bisa didorong apabila ada keseriusan dari masing-masing negara anggota APA,” papar Putri dalam keterangannya sebagaimana yang dikutip [indopos.co.id](http://indopos.co.id) dalam situs resmi DPR, Senin (25/9/2023).

Dirinya yang turut hadir bersama rombongan BSAP DPR yang dipimpin oleh Fadli Zon ini pun berpendapat posisi perempuan di Asia sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus.

“Komite untuk parlemen perempuan. Jadi di APA ini dibicarakan tentang women parliamentarian, tapi bagian dari standing committee sosial dan budaya. Kita melihat ini sangat penting karena posisi perempuan di Asia ini agak berbeda dan memang ada hal-hal yang sifatnya krusial,” jelasnya.

Menurut Putri, prinsip yang paling penting dalam pembentukan komisi perempuan adalah kesetaraan, karena di berbagai industri termasuk di dalam sektor politik masih banyak sekali kesempatan-kesempatan yang belum bisa dicapai oleh perempuan.

Dia berpendapat hal tersebut terjadi karena masih ada bias gender dan masih ada kultur patriarki di berbagai negara Asia.

“Kita merepresentasikan anggota parlemen perempuan dari DPR RI, yang menurut kita paling penting adalah resolusi yang diajukan Azerbaijan sebagai tuan rumah untuk membentuk komisi perempuan dari APA itu sendiri,” ungkap Politisi dari Fraksi partai Golkar ini.

Melalui organisasi APA ini, ucapnya, para anggota parlemen bisa saling berbagi pengalaman dalam berbagai macam hal termasuk dalam menjunjung kesetaraan gender.

“Kita juga bisa belajar bagaimana negara-negara APA yang sudah lebih sukses dalam mendorong representasi perempuan, juga mendorong agar perempuan bisa bertahan di dunia politik dan tentu menyuarakan kepentingan perempuan di dalam pembentukan undang-undang dan juga kebijakan pengawasan serta anggaran yang responsif gender,” jelas Putri.

Dia pun berharap agar perempuan dan laki-laki di Indonesia memiliki kesempatan yang sama di dalam dunia kerja dan edukasi.

“Dan tidak banyak lagi adik-adik kita di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang perempuan dipaksa untuk menikah sebelum usianya, atau pun dipaksa bekerja padahal belum menyelesaikan edukasinya dan ini harusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah, juga karena kalau kita mau maju perempuan harus berkontribusi penuh pada ekonomi kita,” jelas Putri.

Dalam sidang APA tersebut, Putri juga mengaku telah mendorong pentingnya inklusi keuangan bagi perempuan untuk diadopsi dalam naskah resolusi Komite Tetap Bidang Sosial dan Budaya di APA.

Ia menjelaskan sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan untuk memperoleh akses keuangan yang setara.

“Masih banyak hambatan-hambatan yang muncul di lapangan, seperti terbatasnya akses terhadap telepon seluler, jarak geografis dari cabang bank/layanan keuangan, hingga rendahnya literasi keuangan. Hal-hal itulah yang terus menghambat kemampuan perempuan untuk terlibat dalam sistem keuangan formal,” beber Putri. **(dil)**

# JURNAS.com

## BKSAP DPR Terus Berkontribusi Memperkuat Majelis Parlemen Asia

Marlen Sitompul | Senin, 25/09/2023 10:48 WIB



*Ketua BKSAP DPR, Fadli Zon di Sidang IPU ke-144, di Nusa Dua, Bali*

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon bersama dengan Wakil Ketua BKSAP Sukamta dan Achmad Hafisz Tohir, serta Anggota BKSAP Agustina Wilujeng Pramestuti, Putri Anetta Komarudin, Didi Irawadi Syamsuddin, menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya, Asian Parliamentary Assembly (APA) atau **Majelis Parlemen Asia**.

Dalam sidang ini, BKSAP mendorong penguatan organisasi APA dalam implementasi resolusi dan juga evaluasi program-program tersebut serta mendukung pembentukan komite perempuan di APA.

"APA ini masih dalam sebuah proses formasi, dan kita terus berkontribusi di dalam pemikiran bagaimana memperbaiki organisasi parlemen asia supaya mekanismenya lebih tangguh lebih kuat, power full, solid seperti Parlemen Eropa," papar Fadli di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9).

Sidang Komite Sosial dan Budaya APA yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan ini menekankan pentingnya peran APA dalam memperluas kerjasama antara parlemen-parlemen Asia. Fadli berharap kerjasama Parlemen Asia dapat mewujudkan ikatan kerjasama yang produktif antar negara-negara Asia, baik kerjasama dalam hal kebudayaan, ekonomi dan sebagainya.

"Jadi kami termasuk yang berpendapat harusnya yang telah diadopsi di dalam resolusi-resolusi selama ini bisa dijalankan kemudian ada proses evaluasi-evaluasi juga pelaporan. Ini yang kami sampaikan juga di dalam pertemuan di Baku, Azerbaijan bagaimana organisasi parlemen ini bisa lebih efektif," jelas Fadli.

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menyinggung soal kesekretariatan Organisasi APA agar semakin hari semakin solid dan tertata rapi. Meskipun keragaman bangsa dan budaya di Asia sangat heterogen, solidaritasnya akan menjadi kekuatan bagi organisasi APA, maka menjadi tantangan yang sangat besar untuk mewujudkannya.

"Demikian juga memperkuat kesekretariatan, dan juga sedang dibicarakan mekanisme iuran masing-masing anggota di Asia. Dan suatu hari semoga bisa terbentuk Parlemen Asia yang lebih solid meskipun tantangannya cukup besar karena Asia ini keregamanya luar biasa tidak bisa dibandingkan dengan Eropa yang relatif homogen," ungkap Fadli.

# JURNAS.com

## BKSAP DPR: Dibutuhkan Terobosan Baru dalam Keorganisasian Majelis Parlemen

Marlen Sitompul | Senin, 25/09/2023 09:56 WIB



*Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat diwawancarai Parleментарia di Fairmont, Jakarta, Senin (7/8). Foto: Mentari/nr*

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, bertemu dengan Ketua Parlemen Azerbaijan Milli Majlis Sahiba Gafarova. Pertemuan dilakukan bersamaan dengan kunjungan Delegasi DPR RI ke Azerbaijan untuk menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA).

Dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya peran APA dalam memperluas kerjasama antara parlemen-parlemen Asia.

Kedua belah pihak saling mengapresiasi setinggi-tingginya terkait hubungan baik Azerbaijan dan Indonesia sampai saat ini. Tercatat, Azerbaijan dan Indonesia yang tahun lalu merayakan 30 tahun terjalannya hubungan diplomatik, dan telah bekerja sama erat di sejumlah organisasi parlemen internasional, antara lain IPU, NAM-PN (Non Blok), PIUC dan Azerbaijan sendiri adalah negara observer dalam AIPA.

"Pada saat yang sama, Sahiba Gafarova menyebutkan sangat bangga dengan penerimaan Milli Majlis Azerbaijan sebagai anggota pengamat Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) dan menekankan pentingnya organisasi kawasan tersebut," ungkap Fadli di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, dalam organisasi Jaringan Parlemen Gerakan Non-Blok, delegasi parlemen Indonesia ikut serta dalam Konferensi NAM-PN di Baku pada tahun 2022. Pada tahun itu Ketua Milli Majlis, Sahiba Gafarova, juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Pada kunjungan terakhirnya ke Indonesia, pertemuannya dengan Ketua DPR Puan Maharani, serta prospek pengembangan hubungan antar parlemen kedua negara," ujar Fadli.

Fadli Zon, selaku Ketua Delegasi DPR RI, tak lupa juga menyampaikan terima kasih atas keramahamahaman yang diberikan kepada delegasi dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara APA secara tingkat tinggi. Dia mencatat bahwa Indonesia sangat memperhatikan dan mengutamakan pengembangan hubungan dengan Azerbaijan lebih lanjut di banyak bidang.

## VI. DOKUMENTASI













**BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Gedung Nusantara III. Lantai 4  
Komplek Gedung MPR/ DPR/ DPD RI**

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021-5715814, 021-5715907

Faksimili : 021-5734460



@bksapdpr



DPRRI



@bksapdpri



@BKSAP DPR RI